

MENEMBUS NOMINASI KATEGORI PROVINSI / UPAYA DAERAH TINGKAT DUA

# MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

## **BERLAGA DI ARENA IGA**

DAERAH BARU BERMUNCULAN SEBAGAI NOMINASI PENERIMA PENGHARGAAN IGA 2020. REGENERASI INOVASI BARU DAN KEPIAWAIAN DALAM MERAWATNYA MENJADI PENTING AGAR TETAP EKSIS DI ARENA IGA.



VOL 5 NO 6 NOVEMBER-DESEMBER 2020  
LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID  
MAJALAH DWI BULANAN  
P-ISSN 2503 3352  
E-ISSN 2528 4181

# Call for Papers



## MATRA PEMBARUAN

(Nomor Akreditasi: 14/E/KPT/2019 (SINTA 3))

Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2021, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu **Mei dan November**.

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.



Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).

Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya gaya APA (*American Psychological Association*) Lampirkan alamat korespondensi dan penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan nomor telepon penulis.

Google Scholar

MORAREF

neliti

GARUDA  
GARBA BUJUKAN DIGITAL

Crossref

Registrasi dan submit artikel anda di  
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat  
0858 1325 8250/Rifky (Whatsapp Only)  
matrapembaruan@gmail.com

Kemendagri melalui Badan Litbang kembali menggelar penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Kegiatan tahunan ini, sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif. Setelah melewati sejumlah tahapan, tersaring 38 daerah yang masuk nominasi IGA 2020. Jumlah ini terdiri dari 7 provinsi, 19 kabupaten, dan 12 kota. Mereka memperebutkan lima kategori yakni provinsi terinovatif, kabupaten terinovatif, kota terinovatif, daerah tertinggal terinovatif, dan daerah perbatasan terinovatif. Masing-masing kategori akan diambil sejumlah daerah, yakni untuk kategori provinsi diambil 5, kategori kabupaten 10, kategori kota diambil 10, daerah tertinggal sebanyak 3 daerah, dan daerah perbatasan sebanyak 3 daerah. Total yang mendapat penghargaan dalam IGA 2020 sebanyak 31 daerah.

Dari 38 daerah yang masuk dalam nominasi, sebanyak 19 daerah di antaranya merupakan nama baru, yang sebelumnya tidak muncul dalam IGA 2019. Daerah yang pada IGA sebelumnya menerima penghargaan, justru hilang dari peredaran. Timbul tenggelam daerah dalam IGA nyatanya tak hanya terjadi pada tahun ini. Sebelumnya, hal serupa juga terjadi pada gelaran tersebut. Terlebih inovasi yang dapat dilombakan memiliki kriteria

tertentu, misalnya usia inovasi yang dinilai minimal dua tahun anggaran. Usia maksimal inovasi yang dapat dinilai juga dibatasi, maksimal 3 tahun. Karenanya, regenerasi inovasi baru dan kepiawaian dalam merawatnya menjadi penting agar tetap eksis di arena IGA.

Terkait itu, pada edisi Desember 2020 *Media BPP* berupaya mengulas beberapa nama-nama baru yang berhasil masuk dalam deretan IGA 2020. Selain itu, *Media BPP* juga menggalang mengapa pemerintah daerah mengalami timbul tenggelam dalam IGA, dan bagaimana strategi mengatasinya. Ini penting sebagai catatan pemerintah daerah agar segera berbenah. Bagaimanapun inovasi adalah kunci di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Selain menyoal IGA, berbagai informasi menarik lainnya turut disajikan dalam sejumlah rubrik. Misalnya pada rubrik Lebih Dekat, *Media BPP* mengulas sosok Eko Prasjo yang telah banyak berkontribusi dalam membangun reformasi birokrasi di Indonesia.

Berbagai informasi yang dihadirkan, merupakan komitmen *Media BPP* untuk tetap istikamah memberikan informasi seputar isu kelitbang dan Kemendagri. Dengan berbagai narasi yang dihadirkan, diharapkan menjadi diskursus konstruktif, sehingga mampu memberikan perubahan yang lebih baik.

Selamat membaca....

Redaksi...

## MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI, TITO KARNAVIAN  
PENANGGUNG JAWAB A FATONI

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| PEMIMPIN REDAKSI   | KURNIASIH                                                        |
| REDAKTUR PELAKSANA | AJI NUR CAHYO                                                    |
| REDAKTUR           | MATHEOS TAN<br>DEDDY WINARWAN<br>SUGENG HARIYONO<br>SUMULE TUMBO |
| PENYUNTING         | FRISCA NATALIA                                                   |
| PELIPUTAN          | MUJAENI<br>SAIDI RIFKY                                           |
| PENATA LETAK       | SAIDI RIFKY                                                      |
| ILUSTRASI COVER    | TRES AUGUST                                                      |
| INFOGRAFIK         | FAJAR HARAMUKTI                                                  |

bina praja  
press

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI  
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT  
PID@LITBANGKEMENDAGRI.COM

### Kemendagri Dorong Kota Tangguh Bencana

Pandemi yang menjalar ke berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia telah mengubah berbagai kehidupan manusia. Perubahan itu misalnya terhadap tata ruang dan pelayanan publik. Bagaimana Kemendagri merespons perubahan ini?

-pembaca

*Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong konsep perencanaan kota tangguh bencana pandemi. Itu disampaikan Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori, saat Rakornas IAP (Ikatan Ahli Perencana) belum lama ini. Tidak ada pihak yang menyangka bahwa dunia akan dilanda pandemi Covid-19. Karenanya skenario pengalihan fungsi ruang sesuai kebutuhan yang mendesak dalam masa darurat diperlukan. Tata ruang di masa pandemi perlu direncanakan untuk menghadapi situasi tak terprediksi seperti saat ini. Konsep tata ruang di masa pandemi membutuhkan hadirnya smart city yang dapat mengimplementasikan berbagai layanan berbasis digital.*

-Redaksi-

### Perkuat penyelenggara pemilu

Penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menegakkan demokrasi. Oleh karena itu keberadaannya harus diperhatikan termasuk memperkuat kewenangannya. Lantas bagaimana pendapat Kemendagri terkait dengan penguatan tersebut?

-pembaca

*Penguatan kewenangan penyelenggara pemilu dinilai sangat penting agar dalam pelaksanaan tugasnya lebih independen. KPU, Bawaslu, dan DKPP diharapkan menjadi wasit dan juri pemilihan yang adil dan tegas, sehingga pelaksanaan ini benar-benar menjadi hajatan yang mencerminkan suara rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan kewenangan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk lebih diperkuat. Situasi ini diharapkan membuat persiapan pesta demokrasi di masa mendatang lebih baik lagi, dari sisi kualitas maupun sisi kuantitasnya. Jika terjadi kolaborasi di antara tiga lembaga itu, maka akan semakin kuat kewenangan, independensi, dan kemandirian sehingga marwah penyelenggara pemilu lebih terjaga.*

-Redaksi-

### Dorong daerah berinovasi

Penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak dari wabah corona harus dijalankan secara paralel dan integratif. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat sipil di pusat maupun di daerah perlu dibangun lebih intens. Lantas upaya apa yang dilakukan Kemendagri dalam menghadapi tantangan tersebut?

-pembaca

*Kementerian Dalam Negeri mengadakan konsultasi publik antara pemerintah dengan masyarakat sipil, serta sektor swasta untuk penanganan Covid-19 di Denpasar, Bali, Senin 21/12/2020. Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, baik dari kementerian maupun lembaga serta masyarakat. Konsultasi publik ini diharapkan menjadi sarana penyamaan persepsi pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta terhadap kondisi terkini terutama dalam menghadapi dampak pandemi. Sebagai implementasinya, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. SE ini berlaku mulai 17 September 2020. Melalui SE ini, Mendagri meminta kepada para gubernur, bupati/walikota membentuk Satgas Penanganan COVID-19 di daerah, hingga ke tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun/RW/RT.*

*Selain itu Mendagri juga telah menerbitkan SE no 440/5538/S.J, mengenai Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. SE ini ditetapkan pada 6 Oktober 2020, Dengan SE tersebut, masyarakat sipil melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) mendapat kesempatan dan akses mengambil bagian dalam penanganan pandemi Covid-19 bersama dengan pemerintah daerah (pemda) melalui pengadaan barang dan jasa Swakelola Tipe III.*

-Redaksi-

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email pid@litbangkemendagri.com atau melalui whatsapp di +62 878-2852-4786

# MEDIA BPP

VOLUME 5 NO 6 | NOVEMBER-DESEMBER 2020

## LAPORAN UTAMA 38

### IKHTIAR INOVASI DARI TEPI

Semangat inovasi tak hanya ditunaikan oleh daerah-daerah dengan kondisi mapan. Daerah yang berada di pinggiran juga tak surut untuk berinovasi. Dengan inovasi, mereka berupaya memberi pelayanan terbaik di tengah keterbatasan.



## LEBIH DEKAT 44

### MENATA REFORMASI BIROKRASI

Bagi Prof Eko Prasajo membenahi birokrasi adalah hal krusial. Tanpa birokrasi andal, pembangunan tidak dapat berjalan baik. Karenanya, ia konsen mengawal reformasi birokrasi melalui berbagai peran, baik lewat penelitian maupun terlibat dalam struktur pemerintahan.

## LENSA MATRA 14

## RESENSI BUKU 46

## RESENSI FILM 48

## SASTRA 50

## KOMIK 53

## OPINI

## MENGAWAL STABILITAS PEMERINTAHAN DI DAERAH 54

## BERBAGAI INOVASI DAN TELADAN DARI BALI 56

## CATATAN 58

## LAPORAN UTAMA 16-43

### BERLAGA DI ARENA IGA

Daerah baru bermunculan sebagai nominasi penerima penghargaan IGA 2020. Beberapa daerah yang sebelumnya meraih penghargaan justru hilang dari peredaran. Regenerasi inovasi baru dan kepiawaian dalam merawatnya menjadi penting agar tetap eksis di arena IGA.



# Kemendagri Berikan Penghargaan Daerah Terinovatif pada Malam Penganugerahan IGA 2020

**JAKARTA** - Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Litbang berkolaborasi dengan *Majalah TopBusiness* menggelar *Innovative Government Award* (IGA). Kegiatan tahunan ini, sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pada malam puncak IGA, di The Sultan Hotel and Residence, Jumat (18/12/2020).

Mendagri menjelaskan, kegiatan ini merupakan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pasalnya, hal itu masih membutuhkan usaha dan kerja keras secara kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berinovasi, sehingga menghasilkan banyak manfaat. Mendagri mengatakan, manfaat itu bukan hanya bagi daerah, melainkan bagi bangsa dan negara. "Inovasi dan terobosan tersebut, merupakan cikal bakal dari upaya menuju meningkatnya daya saing daerah, yang kemudian akan terakumulasi menjadi peningkatan daya saing secara nasional," kata Mendagri dalam sambutannya.

Mendagri mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berinovasi dalam menjalankan tugasnya. Ia mengatakan, hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah harus disampaikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat mengetahui daerah mana saja yang nilai indeksnya tertinggi, begitu juga seba-

liknya. Dengan cara ini, daerah yang masih tertinggal skor indeksnya, bakal lebih terpacu untuk berbenah. "Selain mendapatkan sertifikat, saya akan usulkan daerah terinovatif mendapatkan dana insentif daerah," kata Mendagri.

Penghargaan IGA 2020 terbagi dalam lima kategori, yakni provinsi terinovatif, kabupaten terinovatif, kota terinovatif, daerah tertinggal terinovatif, dan daerah perbatasan terinovatif. Masing-masing kategori diambil sejumlah daerah. Antara lain 5 besar untuk kategori provinsi terinovatif, 10 besar kabupaten terinovatif, 10 besar kota terinovatif, 3 besar daerah perbatasan terinovatif, serta 3 besar daerah tertinggal terinovatif. Dengan demikian, jumlah daerah yang mendapat penghargaan sebanyak 31 daerah. Tak hanya itu, daerah yang secara penilaian masuk dalam kategori sangat inovatif juga turut diberi penghargaan.

## Penilaian

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni menjelaskan, pemerintah daerah yang menerima penghargaan telah melewati proses seleksi yang ketat. Seleksi ini melalui beberapa tahapan yakni, penjurangan, pengukuran secara digital melalui indeks inovasi daerah, presentasi kepala daerah, dan validasi lapangan. Beberapa tahapan dilakukan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru karena pandemi Covid-19. Adaptasi kebiasaan baru itu misalnya, dalam presentasi kepala daerah yang dilakukan secara virtual. Begitu pula validasi lapangan yang tidak bisa dilakukan karena ma-



■ Kepala Badan Litbang Kemendagri memberikan penghargaan *innovative government award* kepada sejumlah kepala daerah inovatif, di Hotel Sultan, Jakarta (18/12)

sih merebaknya pandemi. "Namun sebagai penggantinya kita melakukan analisa lebih mendalam terhadap substansi inovasi daerah melalui komunikasi virtual," ujar Fatoni.

Adapun tahapan penjurangan berupa penginputan data penerapan inovasi daerah, telah dilaksanakan pemerintah daerah secara *online* sejak 14 Mei 2020 hingga 20 September 2020 melalui Aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri. Sedangkan tahapan validasi data input, melalui pencocokan dan analisa data input. Pelaksanaan validasi data input dimulai dari 22 September hingga 21 Oktober 2020.

Tahapan penilaian berupa presentasi kepala daerah dilaksanakan pada 4 sampai 5 November 2020 secara virtual. Penilaian ini melibatkan tim penilai sebanyak 15 orang yang berasal dari unsur Kemendagri; Kemen PAN-RB; Kemenristek/BRIN; Kementerian Keuangan; Kementerian PPN/Bappenas; Lembaga Administrasi Negara;

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Kamar Dagang dan Industri; Universitas Indonesia; *United Cities and Local Government-Asia Pacific* (UCLG-AS-PAC); Media massa.

Aspek penilaian mengacu pada lima kriteria, yaitu kebaruan, manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, replikatif dan aplikatif, serta penguasaan materi inovasi daerah saat presentasi. "Pemerintah daerah penerima penghargaan merupakan mereka yang mendapatkan skor tertinggi berdasarkan akumulasi nilai indeks inovasi daerah, dan hasil penilaian presentasi kepala daerah," ujar Fatoni.

Sementara itu, merujuk data Indeks Inovasi Daerah, jumlah inovasi yang terjaring sampai dengan 14 Desember 2020 sebanyak 17.779 inovasi daerah. Angka ini meningkat dibanding 2019 yang hanya 8.016 inovasi daerah. Pemerintah daerah yang berpartisipasi

dalam pengisian Indeks Inovasi Daerah diikuti oleh 484 dari 542 pemerintah daerah.

## Kurang inovatif

Agus Fatoni mengungkapkan masih ada 245 pemerintah daerah berkategori kurang inovatif berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah. Daerah tersebut terdiri dari 10 provinsi, 199 kabupaten, dan 36 kota. Di sisi lain masih terdapat 58 pemerintah daerah dengan kategori tidak dapat dinilai (*disclaimer*) yang terdiri dari 55 kabupaten dan 3 kota.

Fatoni mengimbau, agar pemerintah daerah berperan aktif dalam pengisian Indeks Inovasi Daerah. Melalui sistem tersebut akan menghasilkan peta pembinaan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Peta ini memandu Kemendagri dalam melakukan pembenahan di daerah. Bahkan, peta ini dapat dimanfaatkan oleh kementerian/ lembaga lain yang hendak melakukan

peningkatan daerah berinovasi.

Penghargaan IGA 2020 kali ini diselenggarakan dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Pelaksanaan kegiatan IGA 2020, juga dapat diikuti oleh masyarakat di seluruh Indonesia secara daring/virtual, melalui *Zoom Meeting* dan sambungan *YouTube* Badan Litbang Kemendagri. Selain itu, kegiatan ini dibagi dalam empat sesi untuk menghindari kerumunan.

Kegiatan IGA 2020 dihadiri oleh 195 pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif. Dari jumlah itu, 31 di antaranya terinovatif meraih penghargaan IGA 2020, yang terdiri dari 5 provinsi, 16 kabupaten, dan 10 kota.

## Berikut daftar pemerintah daerah terinovatif penerima IGA 2020:

**Pertama**, Kategori Provinsi Terinovatif; Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten.

**Kedua**, Kategori Kabupaten Terinovatif; Kabupaten Situbondo, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Bogor, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tembung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Sumenep.

**Ketiga**, Kategori Kota Terinovatif; Kota Yogyakarta, Kota Bontang, Kota Tangerang, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Sukabumi, dan Kota Bekasi.

**Keempat**, 3 Daerah Tertinggal Terinovatif; Kabupaten Nabire, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Pesisir Barat.

**Kelima**, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif; Kabupaten Bintan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Natuna.

■ MUJAENI

## Potret Pilkada di Tangerang Selatan

**TANGERANG SELATAN** - Melalui pengeras suara, Chairul Anam terus mengingatkan para pemilih agar mengikuti protokol kesehatan yang telah disediakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Pakai sarung tangannya Ibu,” imbau Anam, Rabu (9/12/2020). Anam adalah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 021 Kelurahan Jurangmangu Timur, Tangerang Selatan.

Anam menjelaskan, sebelum memasuki TPS para pemilih diwajibkan mencuci tangannya lebih dulu, kemudian diukur suhu tubuhnya. Jika dinyatakan normal, pemilih kemudian menyerahkan undangan, dan diberi sarung tangan berbahan plastik. Sembari menunggu namanya dipanggil, pemilih dipersilakan untuk berjaga di tempat yang sudah disiapkan. Sebagai penanda telah memilih, jari mereka ditetaskan tinta. “Setelahnya itu mereka kembali mencuci tangan,” ujar Anam. Ia mengaku tidak menemui kesulitan meski pilkada di tengah pandemi adalah sesuatu yang baru. Hanya saja, masyarakat perlu terus diimbau.

Anam menuturkan, pemungutan suara di TPS-nya berjalan lancar dengan partisipasi yang cukup tinggi. Dibuka pada pukul 07.00, sampai dengan pukul 09.00 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sudah nyaris setengah dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah DPT di TPS ini sebanyak 489 pemilih. Anam mengatakan, berdasarkan informasi yang dikantongi, di TPS-nya tidak ada pemilih

yang sedang menjalani karantina mandiri maupun dinyatakan positif Covid-19.

Proses pemilihan sempat terkendala karena hujan yang membuat para pemilih cenderung menunggu. Untuk memfasilitasi pemilih yang terlambat, dirinya mengundur penghitungan suara. “Kita tunggu sampai jam kira-kira setengah satu atau jam satu baru kita penghitungan,” katanya.

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jurangmangu Timur Mardali mengatakan, berdasarkan pengawasannya TPS sudah menerapkan protokol kesehatan. Senada dengan Anam, dirinya mengaku tidak menemui kesulitan berarti dalam menjaga protokol kesehatan. Masyarakat, katanya, juga terlihat antusias. “Semoga ini berjalan lancar dan baik,” harap Mardali.

Sementara itu, Roinah (50) menjelaskan alasannya tetap memilih meski di tengah pandemi. Ia mengaku ada yang kurang dan merasa tidak enak, bila dalam pemilu termasuk pilkada tidak menggunakan hak pilihnya. Dirinya tidak terlalu khawatir meski memilih di tengah pandemi. Terlebih TPS yang dikunjunginya sudah menerapkan protokol kesehatan. “Urusan penyakit mah urusan Allah,” katanya.

Ia berharap, pemimpin yang terpilih dapat membawa Tangerang Selatan menjadi lebih baik. Masyarakat yang masih menganggur segera mendapat pekerjaan. Pilkada, kata Roinah, menjadi momen untuk melakukan perubahan.

■ MUJAENI



■ Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) membimbing pemilih dalam memberikan suara saat Pilkada Tangerang Selatan, Banten, 9 Desember 2020 lalu.

## Badan Litbang Kemendagri Sosialisasikan Regulasi IKKD ke Pemerintah Daerah

**JAKARTA**-Kepala daerah berperan penting dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas. Berbagai kebijakan yang dikeluarkannya akan menentukan tumbuh kembangnya daerah yang dipimpinnya. Dalam meningkatkan kualitas dan meningkatkan kinerja itu, Mendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah. Indeks ini merupakan satuan ukur yang terdiri dari seperangkat variabel, dimensi, dan indikator untuk menilai kinerja kepala daerah.

Badan Litbang Kemendagri sebagai inisiator lahirnya Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) melakukan sosialisasi secara virtual kepada pemerintah daerah, Kamis (10/12/2020). Sosialisasi ini diikuti oleh Badan Litbang Daerah dan perangkat daerah yang mengurus kelitbangan. Guna menghadirkan pemahaman, Badan Litbang Kemendagri juga menghadirkan beberapa narasumber di antaranya, Kepala Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM, Deddy Winarwan, Peneliti Utama Badan Litbang Kemendagri, Hadi Supratikta, dan Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Anselmus Tan.

Deddy menjelaskan, Permendagri ini dilatarbelakangi oleh amanat dari Pasal 381 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal



itu menyebutkan, “Bahwa pemerintah pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun untuk bahan evaluasi”. Kemudian, lanjut Deddy, itu diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 31 ayat (3) menyebutkan “Indeks dan peringkat kinerja penye-

lenggaraan pemerintah daerah disusun setiap tahun oleh menteri”. Adapun menteri yang menjalankan tugas ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (9) yakni menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Dengan regulasi itu, kata Deddy, Mendagri melalui Kepala Badan Litbang berwenang melakukan pengukuran dan penilaian IKKD setiap

tahunnya. Badan Litbang Kemendagri dibantu oleh Badan Litbang atau organisasi yang mengurus kelitbangan di daerah. Peran Badan Litbang Daerah yakni membantu mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan pengukuran dan penilaian IKKD. “Badan Litbang Daerah provinsi misalnya, membantu untuk penilaian IKKD gubernur. Sedangkan Badan

Litbang Daerah kabupaten/kota membantu penilaian bupati/wali kota,” ujar Deddy.

Deddy menuturkan, kepala daerah yang dinilai terbaik bakal menerima penghargaan dari Mendagri. Penghargaan ini berupa piagam dan trofi yang disampaikan langsung oleh Mendagri kepada kepala daerah. Penghargaan

diberikan setiap akhir tahun melalui gelaran *Leadership Award* yang digelar Badan Litbang Kemendagri.

Selain mendapatkan piagam dan trofi, Badan Litbang Kemendagri sedang mengupayakan agar kepala daerah dengan nilai terbaik diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dana insentif daerah. “Kebijakannya sedang diformulasikan atas arahan Bapak Kepala Badan Litbang Kemendagri dan akan dilaporkan ke Bapak Mendagri dalam waktu secepat-cepatnya,” ujar Deddy.

Deddy menambahkan, penilaian ini akan dimulai pada 2021 dengan melibatkan tim penilai dari internal Kemendagri, lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pakar, lembaga *think tank*, serta akademisi.

Sementara itu, Anselmus Tan banyak menjelaskan ihwal metode pengukuran dan penilaian IKKD. Anselmus merupakan Sekretaris Badan Litbang Kemendagri periode 2018-2019. Ia juga banyak terlibat dalam penyusunan Permendagri Nomor 38 Tahun 2020.

Di sisi lain, Hadi Supratikta menjelaskan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya IKKD. Hadi menjelaskan, terbitnya IKKD berawal dari program *Leadership Award* yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada 2006. Seperti namanya, program tersebut menjadi ruang apresiasi bagi kepala daerah yang dinilai terbaik. Namun, pada perjalanannya program ini terhenti yang kemudian dilimpahkan kepada Kemendagri. Selain itu, Hadi juga menjelaskan metode pengukuran dan berbagai instrumen lainnya yang diterapkan dalam penilaian IKKD.

Meski sosialisasi dilakukan secara virtual, para peserta terlihat antusias mengikuti forum tersebut. Para peserta yang tergabung terlihat mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber.

■ MUJAENI



SEKJEN Kemendagri Muhammad Hudori, melakukan pemantauan langsung pelaksanaan pemungutan suara di Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu (9/12/2020). Ia didampingi wali kota Tangerang selatan Airin Rachmi Diani, dan Ketua KPU Arief Budiman.



MASYARAKAT memberikan hak suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kelurahan Jurang Mangu Timur, Tangerang Selatan, Banten pada 9 Desember 2020 lalu. Pilkada di tengah pandemi dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. (FOTO: MUJAENI/MEDIA BPP)



# BERLAGA DI ARENA IGA

Daerah baru bermunculan sebagai nominasi penerima penghargaan IGA 2020. Beberapa daerah yang sebelumnya meraih penghargaan justru hilang dari peredaran. Regenerasi inovasi baru dan kepiawaian dalam merawatnya menjadi penting agar tetap eksis di arena IGA.

**I**NNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) merupakan agenda tahunan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Litbang. Agenda ini menjadi ajang unjuk inovasi bagi seluruh daerah di Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan Kemendagri berupaya mendorong pemerintah daerah agar terus berinovasi dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuannya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu upaya ini dilakukan dengan menggelar IGA.

“Kegiatan ini juga merupakan kewajiban pemerintah untuk mengembangkan invensi dan inovasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan hasil invensi dan inovasi nasional untuk pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019



FOTO 1, 2, 3 dan 4; Sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan inovasi daerahnya di hadapan juri *Innovative Government Award (IGA)* melalui *video conference*.

tentang Sisnas Iptek,” ujar Mendagri, dalam sambutan yang dibacakan Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori, saat membuka forum penilaian presentasi inovasi oleh kepala daerah secara virtual, Rabu (11/4/2020).

Melalui ajang IGA, tambah Mendagri, diharapkan mampu mencapai agenda pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, dengan kegiatan ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah, sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan kawasan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar. “Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan, pengembangan jaringan transportasi massal, penguatan konektivitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan nilai perdagangan wilayah, penguatan daya saing wilayah,” ujar Mendagri.

Ada empat tahapan penilaian IGA yakni, pertama, penjangkaran inovasi yang dimulai dengan sosialisasi dan pengumpulan data inovasi daerah yang dilaporkan secara elektronik. Kedua, tahap pengukuran indeks, pada tahapan ini data yang dimasukkan ke dalam sistem Indeks Inovasi Daerah (IID) akan dianalisis variabel dan indikator indeks inovasi daerahnya secara digital. Ketiga, presentasi kepala daerah. Keempat, validasi data dan pemberian penghargaan.

Akibat merebaknya pandemi, sejumlah tahapan dilakukan dengan adaptasi kebiasaan baru. Misalnya tahapan presentasi kepala daerah yang dilakukan secara virtual. Tahapan validasi lapangan juga ditiadakan. Sebagai gantinya dilakukan dengan analisis lebih mendalam terhadap substansi inovasi daerah melalui komunikasi virtual dan validasi berbasis data.

Setelah melewati sejumlah tahapan, tersaring 38 daerah yang masuk nominasi IGA 2020. Jumlah ini terdiri dari 7 provinsi, 19 kabupaten, dan 12 kota. Mereka akan memperebutkan lima kategori yakni provinsi terinovatif, kabupaten terinovatif, kota



terinovatif, daerah tertinggal terinovatif, dan daerah perbatasan terinovatif. Masing-masing kategori akan diambil sejumlah daerah, yakni untuk kategori provinsi diambil 5, kategori kabupaten 10, kategori kota diambil 10, daerah tertinggal sebanyak 3 daerah, dan daerah perbatasan sebanyak 3 daerah. Total yang akan mendapat penghargaan dalam IGA 2020 sebanyak 31 daerah.

Ketua Tim Penilai IGA 2020, Tumpak Haposan Simanjuntak menuturkan penilaian ini menggunakan 2 aspek yakni satuan pemerintahan daerah dan

■ MENDAGRI Tito Karnavian memberikan penghargaan *innovative government award* kepada sejumlah kepala daerah inovatif, di Hotel Sultan, Jakarta (18/12)

satuan inovasi. Masing-masing aspek memiliki variabel dengan jumlah total sebanyak 7 variabel. Variabel tersebut kemudian diturunkan menjadi 35 indikator yang sebagian besar diambil dari *Global Innovation Index* (GII). Sebagian indikator juga merupakan refleksi dari tugas dan fungsi pembinaan

dan pengawasan Kemendagri.

Tumpak menjelaskan, untuk kategori provinsi nominasinya didominasi daerah di Pulau Jawa. Sedangkan kategori kabupaten dan kategori kota komposisinya variatif. Sementara untuk kategori daerah tertinggal dan kategori daerah perbatasan diisi dari daerah di luar Pulau Jawa. Tumpak mengatakan, adanya kategori tertinggal dan perbatasan, merupakan refleksi untuk melakukan perubahan yang diharapkan dapat diikuti oleh daerah tertinggal

dan perbatasan lainnya. “Secara khusus kita apresiasi nominator dari dua kategori ini,” ujar Tumpak yang juga menjabat sebagai Irjen Kemendagri.

### Timbul tenggelam

Dari 38 daerah yang masuk dalam nominasi, sebanyak 19 daerah merupakan nama baru yang sebelumnya tidak muncul dalam IGA 2019. Daerah yang pada IGA sebelumnya menerima penghargaan, justru hilang dari peredaran. Adanya daerah yang mengalami kondisi timbul tenggelam

dalam IGA diakibatkan sejumlah kondisi. Kasubbid Potensi Inovasi Daerah, Pusat Litbang Inovasi Daerah Isman menjelaskan, daerah penerima penghargaan pada laga IGA memang dinamis atau sering berubah-ubah. Ini serupa inovasi yang juga bersifat dinamis. Menurutnya, inovasi selalu berkembang tergantung pada adanya penyanggahan atas sebuah teori yang memunculkan teori baru, termasuk berubahnya struktur pengetahuan.

Isman menegaskan, fenomena timbul tenggelamnya daerah dalam laga IGA, tidak hanya terjadi pada tahun ini. Hal serupa juga terjadi pada gelaran IGA tahun-tahun sebelumnya. Terlebih inovasi yang dapat dilombakan memiliki kriteria tertentu, misalnya usia inovasi yang dinilai minimal dua tahun anggaran atau telah memiliki dampak. Usia maksimal inovasi yang dapat dinilai juga dibatasi, maksimal 3 tahun. “Yang lebih dari 3 tahun kita sudah menganggap itu sebagai budaya kerja, artinya bukan sebuah hal yang baru lagi,” terang Isman.

Isman menduga, daerah yang hilang dari peredaran IGA disinyalir akibat tidak memelihara novum-novum inovasi baru. Mereka terbawa euforia dari penghargaan yang diterima, sehingga lupa inovasi yang ada tidak dirawat dengan baik. “Mereka hanya berpikir inovasi yang sudah dilakukan, tetapi tidak memikirkan regenerasi apalagi yang bisa dilakukan untuk melahirkan novum-novum inovasi baru,” ujarnya.

Inovasi yang tidak dirawat akan menjadi usang. Misalnya inovasi berupa aplikasi yang harus tetap diperbarui dan ditingkatkan sistemnya. Isman menuturkan, aplikasi yang tak terawat menimbulkan beberapa persoalan, misalnya kinerja sistem menjadi lambat. Supaya inovasi berupa aplikasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu pula melakukan survey kepuasan kepada pengguna. Sur-



vey ini untuk menjangkau saran dan masukan sebagai bahan berbenah. Semakin sesuai dengan harapan masyarakat, penggunaan layanan itu semakin meningkat. “Contohnya lihat saja kita punya *handphone* android, itu juga akan melakukan *upgrade* versinya, dari versi 1, versi 2, atau versi 2 *point* berapa, itu terkait dengan perubahan dalamnya, bukan hanya kebersihan sampah-sampah internet atau *bug* saja, tetapi juga mungkin ada penambahan menu,” katanya.

### Peluang

Isman menerangkan, peluang melahirkan inovasi-inovasi baru sebenarnya dapat muncul dari banyak upaya. Ia mencontohkan, tak sedikit kepala daerah yang menekankan kepada masing-masing perangkat daerah (PD) untuk menghasilkan inovasi dengan jumlah tertentu. Dengan cara ini diharapkan PD dapat terpacu melahirkan inovasi. Selain itu, inovasi bisa lahir dari pemanfaatan proyek perubahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan struktural. Menurutnya, proyek ini mengandung kebaruan yang memang dituntut selama mengikuti diklat. Namun sayang, proyek perubahan yang disusun seringkali tak dimanfaatkan. “Begitu pulang diklat, yaudah laporannya ditaruh di BPSDM atau di rumah. Padahal menurut saya proper (proyek perubahan) itu sudah diuji dan dinyatakan lulus, sudah diperbaiki sebagaimana mestinya, dan yang membuat proper itu paling tau apa yang harus dilakukan, inovasi apa yang dilakukan di lingkup unit kerjanya,” tutur Isman.

Dia menyarankan, agar proper hasil diklat itu dikumpulkan dan dimanfaatkan. Jika perlu Balitbangda atau PD yang menangani kelitbangan memanggil penyusun proper tersebut untuk memberikan pemaparan. Dengan begitu, dapat membangun pemahaman dan menghasilkan inovasi baru, entah dengan pengurangan atau penambahan sesuai kebutuhan. Upaya ini menurut Isman, cukup ampuh melahirkan inovasi, terlebih ditambah dukungan dari

pimpinan melalui berbagai kebijakan. Sebab, tambah Isman, tanpa dukungan pimpinan, inovasi yang dilahirkan para inovator menjadi tak berarti.

Upaya lain yang bisa dilakukan yakni dengan membuat jambore inovasi atau lomba inovasi di tingkat masyarakat atau komunitas kreatif. Dirinya mengapresiasi, beberapa daerah yang telah menerapkan lomba inovasi di daerahnya. Pasalnya, melalui selain memunculkan novum baru, kegiatan ini juga bisa mengetahui kebutuhan masyarakat. Gelaran lomba di tingkat daerah juga mampu memotivasi masyarakat agar terpacu berinovasi. “Karena slogannya kalau saya di Pusat Inovasi Daerah, selalu bilang kalau Anda tidak berinovasi Anda akan mati, itu sudah banyak, perusahaan-perusahaan besar yang tumbang karena tidak dapat bersaing,” katanya. Hal ini juga terjadi pada momen pilkada, masyarakat memilih calon pemimpin dengan catatan dapat memberi perubahan yang lebih baik.

Kondisi daerah yang timbul tenggelam dalam inovasi menjadi penting untuk diperhatikan. Kemendagri sebagai pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintah daerah perlu mengambil tindakan. Melalui Badan Litbang Kemendagri, upaya meningkatkan daerah berinovasi terus dilakukan. Isman menjelaskan, data yang dimasukkan ke dalam IID menghasilkan peta pembinaan. Peta ini memandu Kemendagri dalam melakukan pembenahan di daerah. Bahkan, peta ini dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga lain yang hendak melakukan peningkatan daerah berinovasi.

Peta pembinaan menunjukkan kondisi masing-masing daerah, dari yang terinovatif atau sebaliknya. Isman mengatakan, setiap daerah memiliki persoalannya masing-masing. “Misalnya daerah A dengan daerah B memiliki karakteristik yang berbeda terkait dengan pelaksanaan inovasinya, daerah A kurangnya di inovasi ini, daerah B kurangnya di aspek ini misalnya. Kita juga melihat *treatment-treatment* khusus apa yang bisa kita lakukan, jadi

setiap daerah beda *treatment* karena berdasarkan dari peta pembinaan tadi,” ujarnya.

Khusus daerah yang belum menginput data ke dalam IID, Badan Litbang Kemendagri terus memberikan pengarahannya sekaligus menjelaskan teknis cara penginputannya. Isman mengaku, belum semua daerah menginput data ke dalam indeks inovasi daerah. Meski jumlah daerah yang mengisi saban tahunnya selalu meningkat. Ada pula beberapa daerah yang berinisiatif bekerja sama dengan Badan Litbang Kemendagri untuk mengadakan sosialisasi atau meningkatkan kemampuan teknis pengelola atau operator penginputan IID. Sosialisasi juga bisa berupa konsultasi kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan inovasi.

Sedangkan daerah yang baru muncul

dalam daftar nominasi IGA 2020, Isman menduga, itu karena ikhtiar inovasi yang dilakukan daerah tersebut terukur baik dampak maupun usianya. Ia menyebutkan, ada daerah yang memang sudah memahami konsep inovasi dan mereka berusaha menerapkannya. Komponen pemerintahan, seperti kepala daerah, kepala PD juga mendukung tumbuhnya inovasi. “Kepala daerah juga mendukung, cara berpikir kepala PD-nya juga inovatif, solutif terhadap masalah yang dihadapi,” ujar Isman.

Kendati demikian, daerah yang baru masuk dalam deretan beberapa di antaranya sebelumnya mengajukan bimbingan oleh Badan Litbang Kemendagri. Di tengah pandemi, budaya berkomunikasi secara virtual semakin terbangun, sehingga jarak tidak men-

jadi halangan berkomunikasi. Badan Litbang Kemendagri selalu terbuka kepada daerah yang hendak berkonsultasi seputar inovasi daerah.

### Tak surut

Meski di tengah pandemi Covid-19, partisipasi daerah dalam menginput indeks inovasi daerah meningkat. Pada dasarnya pengisian indeks inovasi daerah ini dilakukan secara elektronik, sehingga pandemi tidak menjadi halangan berarti. Isman menjelaskan, sejak awal IID memang dikonsepsikan untuk melakukan penilaian tanpa perlu bertatap muka. Ini juga memangkas biaya daerah dalam mengirimkan bukti-bukti inovasi yang dilakukannya. “Kalau kita melihat indeks ini dampaknya sudah luar biasa, harusnya daerah datang ke Jakarta, saya yakin kalau 600 inovasinya yang dibawa, kira-kira

berapa dokumen yang dibawa,” kata Isman.

Dengan sistem ini, pemerintah daerah sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam pengisian indeks inovasi. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa partisipasi daerah dalam pengisian indeks cenderung meningkat. Di samping itu, sosialisasi pentingnya pengisian indeks kepada pemerintah daerah terus digalakan secara virtual.

Sampai dengan 14 Desember 2020 sebanyak 17.779 inovasi daerah sudah terhimpun ke dalam IID. Angka ini meningkat dibanding 2019 yang hanya 8.016 inovasi daerah. Pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam pengisian IID 2020 sebanyak 484 dari 542 pemerintah daerah.

■ MUJANI



Mendagri Tito Karnavian memberikan sambutan dalam penyelenggaraan IGA 2020 yang dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta.



# MENEMBUS NOMINASI KATEGORI PROVINSI

DERETAN DAERAH BARU YANG BERHASIL MASUK DALAM NOMINASI IGA 2020 TERSEBAR DI SEMUA KATEGORI. DI KATEGORI PROVINSI TERINOVATIF ADA TIGA DAERAH YANG BERHASIL MASUK DALAM NOMINASI. DUA DARI TIGA DAERAH ITU, PROVINSI LAMPUNG DAN SUMATERA SELATAN. INOVASI SUDAH LAMA DIMILIKI, HANYA SAJA PENDAFTARANNYA KE DALAM SISTEM INDEKS INOVASI DAERAH BARU TERTATA.

**G**UBERNUR PROVINSI LAMPUNG, Arinal Junaidi menghadap ke kamera yang sudah terhubung dengan *Zoom Meeting* Kemendagri. Dia hendak memaparkan capaian inovasi Provinsi Lampung di depan tim penilai IGA 2020. Tahun ini, provinsi yang dipimpinnya masuk sebagai nominasi IGA 2020 kategori provinsi terinovatif. Capaian ini terbilang gemilang, dibanding tahun sebelumnya yang tak masuk dalam deretan daerah calon penerima penghargaan. Sebab masih dalam keadaan wabah, presentasi sebagai bagian dari tahap penilaian dilakukan secara virtual.

Mengawali paparan, Arinal menyampaikan apresiasinya kepada Kemendagri yang telah menginisiasi gelaran IGA. Inovasi, katanya, merupakan bagian dari terobosan yang dapat diterapkan di bidang pemerintahan, industri, swasta, maupun pelayanan

publik. Inovasi dikembangkan untuk memutus rantai birokrasi yang panjang, dan memangkas biaya tinggi, efektivitas kerja, serta perbaikan mutu. Pembangunan budaya inovasi di tingkat daerah, akan menciptakan daya saing antardaerah dalam tatanan otonomi daerah. Meningkatnya daya saing ini akan menopang daya saing secara nasional. “Inovasi merupakan kata kunci dalam pembangunan,” kata Arinal, Rabu (11/4/2020).

Provinsi Lampung mengedepankan empat inovasi unggulan dalam ajang IGA 2020. Inovasi itu meliputi bidang pendidikan, keuangan, dan kesehatan. Keempat inovasi itu yakni Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIP-PAKDE); Lampung Mengajar (Semangat pengajar Muda Membangun Pendidikan); e-PAP dan e-PBBKB (Digitalisasi Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor); dan Posbindu Cerdik Jiwa (Sistem Deteksi Dini Kesehatan Jiwa).

SIP-PAKDE mencakup tiga aspek. Pertama, perencanaan yang masuk dalam *e-planning*. Sistem perencanaan pembangunan daerah ini mengintegrasikan seluruh perencanaan perangkat daerah. Kedua, penganggaran atau *e-budgeting*. Sistem ini mengintegrasikan standar satuan harga (SSH), harga satuan pokok kegiatan (HSPK), analisis standar biaya (ASB), dan rencana umum pengadaan (RUP). Ketiga, sistem ini juga mengakomodasi di bidang pertanggungjawaban atau *e-mon-ev*. Untuk mencegah tindakan korupsi, SIP-PAKDE telah disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SIP-PAKDE telah terhubung dengan Sistem Pemda Online, SIRUP LKPP (Sistem Informasi Rencana Umum Pelelangan), Sistem

Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) Kemendagri, Pusdatin-Bangda milik Bappeda Provinsi Lampung, serta Aplikasi Kanal Pajak milik Kementerian Keuangan. Inovasi ini mampu mengintegrasikan sistem pelayanan yang sebelumnya parsial, meningkatkan transparansi, dan membuat sistem lebih akuntabel. Arinal menjelaskan, berkat sistem ini, perencanaan pengelolaan keuangan lebih bijaksana karena mengutamakan prinsip kehati-hatian. Inovasi ini sudah direplikasi oleh beberapa daerah lain.

Inovasi lainnya, yakni Lampung Mengajar. Arinal berkata, semangat pengajar muda menjadi ujung tombak dalam membangun pendidikan di daerah. Inovasi ini berangkat dari kondisi pendidikan di daerah tertinggal, terpencil, terluar (3T) yang mengalami banyak masalah, seperti kurangnya pengajar, mutu pelayanan rendah hingga sulitnya akses menuju sekolah. Hal ini membuat disparitas mutu pendidikan dengan daerah perkotaan begitu jauh. “Maka program Lampung Mengajar hadir sebagai jawaban atas permasalahan tersebut,” terang Arinal.

Arinal memaparkan, saat ini para pengajar muda telah tersebar di 12 kabupaten di Provinsi Lampung. Sejak 2017 hingga 2020 program ini telah memfasilitasi 137 sekolah di daerah 3T. Sebanyak 450 tenaga Lampung Mengajar telah terserap. Mereka telah banyak membantu se-

kolah yang sebelumnya bermasalah. Berkat Lampung Mengajar, mereka kini bisa bersaing dengan sekolah yang ada di perkotaan. “Pada akhirnya dapat teratasi melalui program Lampung Mengajar,” katanya.

Masuknya Provinsi Lampung dalam deretan nominasi, tak terlepas dari upaya yang dilakukan daerah terse-



but untuk meningkatkan inovasi dan mendaftarkannya ke dalam IID. Kepala Badan Litbang Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis kembali mengingat kala ia baru menjabat sebagai Kepala Balitbangda pada awal 2019. Sebagai PD yang menangani kelitbangan, Balitbangda melaksanakan fasilitasi inovasi. Karenanya, Balitbangda berperan mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh kegiatan inovasi daerah.

Pada awal kepemimpinannya, Hamartoni menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi yang mengundang Kepala Badan Litbang Kemendagri. Saat

Seorang guru mengajar murid sekolah dasar. Kegiatan tersebut, merupakan bagian dari inovasi Lampung Mengajar yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung

itu, Kepala Badan Litbang Kemendagri masih dijabat Dodi Riyadmadji. Dodi menjelaskan, bahwa Provinsi Lampung masuk dalam zona merah menurut data IID. Bahkan, kondisi itu di bawah kabupaten sekitar, seperti Lampung Barat, Lampung Utara, dan Mesuji.

Dalam sistem IID, zona merah bermakna daerah tersebut sangat kurang

dalam inovasi. Kategori itu berdasarkan data yang diinput dalam IID. Selain sebagai bukti melakukan inovasi, data itu merupakan laporan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri selaku pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintah daerah. Data ini, menjadi acuan awal untuk menilai daerah yang bersangkutan masuk dalam kategori terinovatif atau justru sebaliknya.

Mengetahui fakta tersebut Hamartoni kaget dan segera melakukan tindakan untuk membenahinya. Terlebih dulu ia mengumpulkan perangkat kerja Balitbangda. “Sebagai Kepala Badan Litbang, saya merasa miris sekali.

Akhirnya setelah itu, saya kumpulkan kawan-kawan di bidang (Balitbangda),” ujar Hamartoni saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).

Pertemuannya bersama internal Balitbangda, menghasilkan beberapa kesepakatan untuk memperbaiki inovasi. Kesepakatan itu, yakni bertekad mengeluarkan Provinsi Lampung dari zona merah dan menengguli kabupaten/kota di lingkungannya. Upaya ini diawali dengan menjajaki inovasi yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (PD). Berdasarkan penelusuran itu, ternyata banyak inovasi yang dimiliki PD, tetapi tidak terdaftar di sistem IID. Kondisi ini disinyalir akibat ketidaktahuan dari operator maupun kepala PD-nya ihwal IID.

Setelah itu, dalam rapat koordinasi Provinsi Lampung, Gubernur mengarahkan seluruh PD yang memiliki inovasi agar mendaftarkan inovasinya ke dalam IID. Instruksi ini diperkuat dengan pemberian surat kepada masing-masing PD. Sejak saat itu, pendaftaran inovasi mulai dilakukan meski tersendat-sendat.

Beberapa langkah dilakukan Balitbangda dalam menggenjot skor inovasi daerah. Satu di antaranya meminta arahan dari Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Litbang Kemendagri. Arahan melalui komunikasi virtual itu melibatkan seluruh PD, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. “Saya ingat betul waktu itu beliau (Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah) berkenan dan menjelaskan teknisnya seperti apa. Dengan adanya penjelasan itu kemudian teman-teman PD sedikit terbantu, artinya sudah terbuka bagaimana inovasi mereka harus teregistrasi ke dalam lomba IGA,” tutur Hamartoni.

Balitbangda Provinsi Lampung juga membentuk tim Klinik Inovasi. Tim





ini berperan sebagai fasilitator yang membantu PD mendaftarkan inovasinya ke dalam sistem IID. Tim ini berlaku sampai batas waktu yang ditentukan. Hamartoni menyebutkan, Klinik Inovasi dibentuk tanpa ada dukungan anggaran. Meski begitu, jurus 3S (semangat, selalu bersama, dan solid) yang diterapkan, membuat semangat tim tak surut. Jurus itu selalu diterapkannya tak hanya menyoal inovasi daerah, tetapi juga menyangkut seluruh kegiatan.

Meski Klinik Inovasi membantu proses penginputan data ke IID, Hamartoni mengaku masih belum puas dengan hasil yang dicapai. Sebab, Provinsi

Lampung masih belum unggul dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Bersama tim, dia mendatangi langsung masing-masing PD, agar segera merespons pengisian data inovasi yang dimiliki ke IID. "Karena kita merasa tidak puas dengan apa yang mereka lakukan, karena ada suatu hal yang masih tersembunyi oleh mereka, karena ketidaktahuannya, kita berikan asistensi dengan tim itu ke masing-masing PD, *door to door*," terangnya.

Hasil dari penelusuran ke masing-masing PD, didapati beberapa satuan kerja di dalamnya memiliki inovasi. Setelah diberikan asistensi, dibarengi dengan surat peringatan ke PD

melalui Sekretaris Daerah barulah mereka melakukan pembenahan. Satu persatu inovasi yang dimiliki terdaftar ke dalam sistem IID dan skornya mulai unggul di Provinsi Lampung. Bahkan, di tingkat provinsi, Lampung berhasil bertengger di deretan nominasi IGA 2020. "Kita lapor ke Pak Gubernur, bahwa kita sudah masuk dalam nominator lomba IGA 2020," katanya.

Hamartoni mengatakan, melahirkan inovasi sebenarnya tidak terlalu sukar. Regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat klausul yang menyebutkan pemerintah daerah bisa melakukan inovasi berupa pembaruan, bersifat kebijakan, maupun

mengalami kesulitan dalam menyusun rancang bangun. Karenanya, dengan Klinik Inovasi persoalan itu berusaha diatasi. "Nah ini salah satu hambatan kami dalam mengoordinasikan kegiatan inovasi daerah berkaitan lomba IGA 2020," katanya. Dirinya berharap hambatan serupa tak terulang lagi pada tahun berikutnya.

Usaha yang dilakukan Balitbangda untuk mendongkrak inovasi di Provinsi Lampung tak sia-sia. Menurut data IID, Provinsi Lampung berhasil mengumpulkan 303 inovasi daerah. Jumlah itu terdiri dari 171 inovasi pelayanan publik, 42 inovasi tata kelola pemerintahan daerah, dan sebanyak 90 inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Daerah itu berhasil bertengger di barisan nominator IGA 2020.

Hamartoni menuturkan, inovasi yang terinput dalam IGA 2020 beberapa di antaranya berasal dari Balitbangda. Beberapa inovasi itu satu di antaranya yakni, Gerbang Pelana (Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna). Inovasi ini untuk mempercepat sinergitas pembangunan wilayah pesisir Lampung dan sekitarnya, dengan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, kebijakan-kebijakan pusat dan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. "Melalui program ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah pesisir untuk mewujudkan masyarakat pesisir Lampung yang maju dan sejahtera," terang Hamartoni.

Inovasi lainnya misalnya inkubasi inovasi. Kegiatan ini dilatarbelakangi karena fluktuasi harga komoditas ubi kayu di Provinsi Lampung yang berdampak pada melemahnya kondisi ekonomi, terutama petani. Peralannya, komoditas ubi kayu merupakan ukuran kunci dalam perekonomian Lampung. Namun, dengan kegiatan inkubasi oleh Balitbangda pada 2019 ini, ubi kayu dapat diolah menjadi tepung ubi kayu

tinggi protein. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama antara Balitbangda Provinsi Lampung dengan Politeknik Negeri Lampung.

### Provinsi Sumatera Selatan

Selain Provinsi Lampung, provinsi lain yang baru masuk IGA yakni Sumatera Selatan (Sumsel). Gubernur Sumsel, Herman Deru menjelaskan dalam memaksimalkan inovasi pihaknya menerapkan beberapa strategi. Pertama, menekankan kepada perangkat daerah bahwa inovasi tak harus canggih dan mahal. Terpenting, kata dia, inovasi yang diterapkan dapat menjawab kebutuhan lapangan secara merata, sehingga berdampak kepada masyarakat. Kedua, membentuk mental inovator, melalui jurus 4 S yaitu, setiap orang dapat menjadi inovator, setiap masalah justru menjadi peluang inovasi, sinergi menyusun solusi, setiap inovasi konkret hasilnya.

Gelaran IGA menurut Herman, mampu menciptakan budaya inovasi. Provinsi Sumsel, katanya, telah membangun budaya itu, salah satunya melalui dukungan penerbitan regulasi. Beberapa regulasi untuk mendukung inovasi tersebut di antaranya: 1. Instruksi gubernur tentang *one agency one innovation*; 2. Peraturan gubernur tentang inovasi di daerah; 3. Surat keputusan gubernur tentang penerapan inovasi daerah; 4. Surat keputusan gubernur tentang tim pemilihan inovator daerah.

Berbagai inovasi diakui telah dilakukan oleh Provinsi Sumsel. Herman mengaku inovasi di daerahnya saban tahun selalu meningkat. Misalnya jumlah inovasi yang masuk dalam IID pada 2019 yang hanya 33 inovasi. Tahun ini jumlah itu jauh melesat menjadi 616 inovasi yang berhasil diinput. Jumlah ini meliputi 72 inovasi tata kelola pemerintahan, 71 inovasi pelayanan publik, dan 351 inovasi lainnya.

Herman menyebutkan salah satu inovasi yang masuk dalam ajang IGA 2020 itu misalnya pengalengan pindang ikan patin yang melibatkan industri kecil menengah (IKM).

■ Proses pengalengan pindang patin oleh beberapa pegawai. Pengalengan pindang patin merupakan salah satu inovasi unggulan Provinsi Sumatera Selatan

teknologi. Hamartoni menduga, banyaknya inovasi yang tak terdaftar karena tak sedikit PD beranggapan apa yang dilakukannya bukanlah bagian dari inovasi. Akibatnya, mereka tidak terlalu perhatian.

Kurangnya pemahaman itu disumbang dengan rotasi jabatan dari satu posisi ke posisi lain. Terlebih, rotasi jabatan yang perannya teknis. Mereka

“**INOVASI INI MUNCUL ATAS PENELITIAN BALITBANGDA. SUMSEL MERUPAKAN DAERAH PENGHASIL PATIN YANG CUKUP MELIMPAH. SETIAP TAHUNNYA MAMPU MENGHASILKAN SEKIRA 137 RIBU TON PATIN**”

Inovasi ini muncul atas penelitian yang dilakukan Balitbangda. Sumsel merupakan daerah penghasil patin yang cukup melimpah. Setiap tahunnya mampu menghasilkan sekira 137 ribu ton patin. Patin tersebut masih dijual dalam kondisi segar, sehingga hilirisasi yang terkenal berupa kuliner pindang ikannya belum maksimal. Di sisi lain, pengemasan pindang ikan patin masih tradisional sehingga mudah rusak dan sulit dipasarkan ke daerah lain. Sedangkan harga mesin pengalengan terbilang mahal, sehingga IKM tak mampu berinvestasi.

Inovasi pengalengan pindang kemudian diinisiasi dengan dukungan inovasi kemitraan akademisi, dunia usaha, dan pemerintahan. Pemerintah daerah melakukan investasi berupa mesin pengolahan pangan sesuai dengan standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Masyarakat atau IKM hanya membayar biaya sesuai kaleng yang digunakan. Pembayaran ini sebagai retribusi daerah yang diatur sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Hasilnya terbentuknya daya saing, tetapi IKM tidak terbebani dengan investasi,” kata Herman.

Dengan inovasi ini, IKM baru bermunculan dan mampu meningkat-

kan pendapatan masyarakat. Melalui pengemasan dalam kaleng, pindang ikan patin dapat dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Ini juga berdampak terhadap naiknya PAD Sumsel. Selain inovasi pengalengan pindang ikan patin, Sumsel memiliki sejumlah inovasi lainnya. Herman menyebutkan, sebanyak 357 inovasi daerah telah direplikasi oleh pemerintah daerah lain, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

**Peran Balitbangda**

Serupa Provinsi Lampung, masuknya Provinsi Sumsel dalam deretan nominator penghargaan IGA 2020 tak lepas dari upaya yang dilakukan, termasuk oleh Balitbangda setempat. Semua hasil yang dituai itu bukan datang tiba-tiba, melainkan dengan usaha. Sebelum berhasil masuk nominasi IGA 2020, skor IID Sumsel terbilang rendah. Balitbangda Sumsel kemudian mengevaluasi, untuk mencari resep ampuh mengatasinya. Kepala Balitbangda Sumsel, Ekowati Ratnaningsih, mengatakan evaluasi dilakukan dengan mengacu pada surat keputusan Mendagri terkait capaian IID Sumsel yang masih masih rendah.

Rendahnya skor ini kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang narasumber dari Badan Litbang Kemendagri untuk memberikan pengarahannya dan diskusi memetakan permasalahan inovasi di Sumsel. Didapati musabab rendahnya nilai itu, karena inovasi yang dimasukkan dalam IID sedikit. “Dari hasil diskusi dengan para pakar tentang inovasi daerah itu, kami mencoba mengidentifikasi apa masalah sebenarnya. Biasa ya sebetulnya kita identifikasi apa kelemahan kita, kekuatan kita, kemudian peluang-peluang yang ada,” ujarnya.

Dirinya meyakini, rendahnya skor itu akibat usaha yang dilakukan belum maksimal terutama dalam mengumpulkan inovasi dari seluruh PD. Sejak akhir tahun kemarin, Balitbangda mulai berupaya meningkatkan skor IID dengan menginput seluruh inovasi yang dimiliki PD ke dalam sistem IID.

Namun, upaya itu bukan tanpa kendala, sehingga membutuhkan strategi penanganan. Terlebih, jumlah PD Sumsel melimpah. “Sebelum ke sana kita perlu punya dulu nih rekapnya atau datanya inovasi apa saja yang ada di PD,” ujarnya.

Untuk mengoordinasi inovasi di masing-masing PD maka dibentuk PIC (*Person in Charge*) atau orang yang bertanggung jawab terhadap inovasi yang dimiliki PD tersebut. Orang-orang itu ditetapkan melalui surat keputusan gubernur. Mereka bertugas mengumpulkan inovasi yang ada di PD. Balitbangda juga membentuk tim PIC internal yang setiap anggotanya menangani beberapa PD. Sebelumnya,

mereka dibekali pemahaman ihwal inovasi yang melibatkan dari Badan Litbang Kemendagri. Beberapa PD yang terlambat mengumpulkan inovasi akan mendapat teguran dari gubernur. Dari penerapan itu, PD menyambut baik dengan melaporkan masing-masing inovasi. Walhasil jumlah inovasi yang terdaftar dalam IID meningkat drastis. “Jadi memang benar-benar dipersiapkan dari awal untuk meningkatkan nilai indeks inovasi daerah ini,” katanya.

■ Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel (dua dari kanan) melakukan kunjungan ke UKM pengolahan pindang tangkep yang selanjutnya akan dikemas dalam kaleng.

Ekowati mengatakan, Gubernur Sumsel memiliki konsen terhadap inovasi daerah. Komunikasi secara intens dengan Gubernur menjadi salah satu kunci meningkatnya skor IID. Dengan perhatian Gubernur, Balitbangda menjadi semangat untuk terus bergerak mengumpulkan inovasi daerah. Komunikasi dengan PD sudah dibangun hampir setahun untuk ikut dalam IGA. Bahkan, ada grup percakapan daring lintas PD untuk membahas IGA. “Kita buka satu ruangan jadi sekretariat IGA, kita bikin jadwal untuk melayani PD,” katanya.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Ekowati optimis Sumsel tahun ini dapat menerima penghargaan IGA.

Dirinya juga mengapresiasi Badan Litbang Kemendagri yang menggelar pengukuran IID. Sebab, dengan kegiatan ini pemerintah daerah bisa berkaca dan membandingkannya dengan daerah lain. “Kalau tidak ada pengukuran indeks inovasi daerah ini jangan-jangan nanti daerah seperti menjadi katak dalam tempurung. Merasa sudah bagus indeks inovasi daerahnya, ternyata masih jauh tertinggal. Dengan adanya penilaian ini sangat luar biasa, menurut saya ini sangat bermanfaat,” tuturnya.

Daerah yang masuk dalam deretan nominasi IGA seringkali timbul tenggelam. Artinya, capaian inovasi yang didapatkan tahun ini, tidak menjamin dituai pada tahun berikutnya. Terlebih, inovasi yang dapat dilombakan memiliki syarat batas usia minimum dan maksimum. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah untuk menjaga konsistensinya dalam membangun inovasi di daerah.

Menurut Ekowati, agar tidak timbul tenggelam memang harus ada yang bersedia maju memperjuangkan dengan selalu mengoordinasi inovasi di daerah. Dirinya meyakini, setiap PD pasti memiliki inovasi. Sebab, saban menghadapi masalah baru, akan memunculkan penanganan yang baru pula dan itu merupakan sebuah inovasi. Hanya saja, inovasi itu tidak terekam ke dalam sistem IID. Meski PD diberikan akses ke dalam sistem IID untuk mengisi secara mandiri, tanpa dikawal perkembangannya tidak menjamin semuanya mengisi. Karenanya ini menjadi tantangan untuk menjaga konsistensi tersebut. “Karena tidak semua *aware*, bahwa indeks inovasi daerah itu penting. Inilah peran Balitbangda sebagai *leading sector*. Kita harus membangun *image* kalau inovasi daerah itu, Balitbangda koordinatornya,” katanya. Ekowati meyakini, daerah yang masuk dalam nominasi IGA, pasti memiliki sosok yang menjadi agen perubahannya.



■ MUJAJENI

# UPAYA DAERAH TINGKAT DUA

BEBERAPA DAERAH BARU BERMUNCULAN DI KATEGORI KABUPATEN TERINOVATIF DAN KATEGORI KOTA TERINOVATIF. NAMA-NAMA ITU MISALNYA KABUPATEN WONOGIRI DAN KABUPATEN TEMANGGUNG. SEDANGKAN UNTUK KATEGORI KOTA TERINOVATIF SATU DI ANTARANYA ADALAH KOTA PALEMBANG. BAGAIMANA DAERAH-DAERAH TERSEBUT MAMPU MASUK DALAM DERETAN NOMINATOR IGA 2020?



Pasar Papringan adalah salah satu inovasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Koin bambu adalah salah satu alat tukar yang digunakan dalam transaksi di pasar tersebut



**D**AERAH yang masuk dalam nominasi IGA 2020 memiliki cerita-masing. Misalnya Kabupaten Wonogiri yang menggenjot pendataan inovasi daerah melalui ajang *Wonogiri Innovation Awards*. Sedangkan Kabupaten Temanggung, lebih menekankan pada pendekatan dengan gerakan masyarakat. Sementara Kota Palembang, yakni menekankan kepada peran Bappeda setempat yang getol mengumpulkan inovasi yang dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah (PD) di lingkungannya.

Didampingi jajarannya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Wonogiri, Edy Santotu,

mulai memaparkan inovasi daerah yang dimiliki Kabupaten Wonogiri. Edy menjelaskan, salah satu inovasi unggulan yang dimiliki Kabupaten Wonogiri adalah *Telunjuk Sakti*. Inovasi ini untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan (*Adminduk*). *Telunjuk Sakti* bertujuan menciptakan sistem pelayanan *Adminduk* yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dekat, gratis, serta dapat dicetak dan divalidasi tanpa batas ruang juga waktu.



*Telunjuk* bermakna, bahwa kebutuhan administrasi kependudukan dapat diurus dengan jari telunjuk yang mengkonotasikan penggunaan gawai atau komputer. Kemudian *Sakti* adalah singkatan dan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. “Hanya dengan jari telunjuk masyarakat dapat mengajukan permohonan *Adminduk*, dan petugas dapat melayani melalui aplikasi di komputer maupun *handphone*,” ujar Edy, saat presentasi di depan Tim Penilai IGA 2020 secara virtual, Rabu (4/11/2020).

Selain *Telunjuk Satu*, Wonogiri juga memiliki produk roti gaplek wonogiri (*inagiri*). Olahan pangan lokal yang diproduksi salah satu UKM di Wonogiri

Sebelum lahirnya *Telunjuk Sakti*, pelayanan *Adminduk* masih terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*Disdukcapil*), sehingga berkas pencetakan dokumen juga masih terpusat. Di sisi lain, layanan ini tidak memiliki kepastian waktu kapan dokumen yang diajukan rampung diproses. Pelayanan *Adminduk* juga dinilai lambat, tidak efektif, dan tidak efisien. Bahkan, pelayanan ini rentan terjadi-

nya praktik calo. Karakteristik Kabupaten Wonogiri dengan luas wilayah 190.423 hektare dengan topografi perbukitan, membuat *Telunjuk Sakti* menjadi angin segar bagi masyarakat.

Edy menuturkan, masyarakat sebagai pemohon hanya perlu mendaftar akun *Telunjuk Sakti* dengan mengisi identitas diri seperti nama, nomor induk kependudukan (*NIK*), dan nomor telepon, serta foto berkas persyaratan. Semua dokumen *Adminduk*—kecuali *e-KTP* dan *KIA*—dapat dicetak di semua jenis loket. Ada 5 jenis pilihan loket, meliputi loket dinas, loket kecamatan, loket desa/kelurahan, loket fasilitas kesehatan, dan loket mandiri perseorangan.

Edy menjelaskan, strategi penerapan *Telunjuk Sakti* ini yaitu komitmen dari perangkat pemerintah daerah dan juga masyarakat. Kepala daerah telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penerapan *Telunjuk Sakti*.

Sejak menerapkan *Telunjuk Sakti*, Kabupaten Wonogiri mampu meraih sejumlah pencapaian di antaranya: Mendapat predikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (*WBK*) pada 2019 menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (*WBBM*) pada 2020; Mendapat predikat evaluasi pelayanan publik “sangat baik” pada 2019 menuju “prima” pada 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan *Adminduk* meningkat dari 77,51 (cukup) menjadi 85,16 (baik); Capaian kepemilikan *KTP-El* dan Akta pencatatan sipil meningkat.

Penerapan ini juga membuat tren permohonan melalui loket mengalami perubahan. Masyarakat menjadi sering menggunakan loket desa/kelurahan. Ini ditandai dengan grafik penggunaannya semakin naik. Sedangkan tren permohonan melalui loket dinas

semakin menurun. Begitu pula dengan permohonan melalui loket kecamatan semakin menurun. Edy mengatakan, ini menandakan pelayanan *Adminduk* semakin dekat dengan masyarakat. Perubahan ini berdampak pada penghematan biaya operasional masyarakat dalam mengurus *adminduk*. Khususnya masyarakat yang tinggalnya jauh dari pusat pemerintahan, yang rata-rata jaraknya sekira 40 kilometer. “Dengan rata-rata pemohon di *Disdukcapil* 470 pemohon per hari, apabila masyarakat harus mengeluarkan biaya Rp 100 ribu, maka dalam sehari ada penghematan Rp 47 juta, jika sebulan kurang lebih hampir Rp 1 miliar,” terangnya.

Edy menerangkan, beberapa daerah pernah studi lapangan untuk melihat inovasi *Telunjuk Sakti*. Daerah itu seperti Sukoharjo, Karanganyar, Jepara, Pemalang, Klaten, dan Magelang. Sedangkan daerah yang sedang koordinasi untuk mereplikasi adalah Kabupaten Waringin Barat, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Pacitan.

*Telunjuk Sakti* merupakan satu dari sekian inovasi daerah yang dimiliki Kabupaten Wonogiri. Berbagai inovasi yang dimiliki tak terlepas dari usaha daerah tersebut untuk perhatian terhadap inovasi daerah. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Wonogiri, Heru Utomo, menjelaskan untuk memacu perangkat daerah, sekolah, maupun masyarakat agar berinovasi, tahun ini digelar *Wonogiri Innovation Awards*.

Melalui kegiatan ini, sekiranya ada 278 inovasi yang berhasil terhimpun. Inovasi itu terdiri dari yang berbasis pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat yang mayoritas dari *KUKM* (*Koperasi Usaha Kecil Menengah*). Inovasi yang masuk dalam *Wonogiri Innovation Awards* sekaligus didaftarkan dalam IGA 2020 melalui sistem indeks inovasi daerah (*IID*). “Ini kiat kami, sekali bekerja untuk *Wonogiri*



*Innovation Awards* juga didaftarkan di IGA,” kata Heru.

Melalui strategi itu, Kabupaten Wonogiri berhasil menginput 336 inovasi dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah (IID). Jumlah itu terdiri dari 53 inovasi tata kelola pemerintahan, 89 inovasi pelayanan publik, dan 194 inovasi lainnya. Berkat capaian ini, Kabupaten Wonogiri berhak melenggang sebagai nominasi IGA 2020 dengan kategori kota terinovatif. Heru menyebutkan, misi Bupati Wonogiri salah satunya mewujudkan Wonogiri yang berdaya saing. Bupati, kata Heru, dalam setiap pertemuannya selalu menekankan pentingnya inovasi.

Heru menerangkan, dalam membangun ekosistem budaya berinovasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah membentuk Forum Masyarakat Pecinta Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Forum ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Melalui forum ini, perangkat daerah (PD) dan masyarakat dapat terpacu untuk berinovasi. Pemerintah juga melakukan fasilitasi dan dukungan terhadap forum tersebut. Fasilitasi pembinaan itu misalnya dari mulai rancang bangun perencanaan sampai inovasi bisa diterapkan. Para inventor diberikan pendanaan untuk membangun atau mengembangkan inovasinya. Pendanaan untuk kegiatan inovasi ini masih mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun ke depan, tak menutup kemungkinan Bappeda Litbang akan menjalin kerja sama dengan para pengusaha yang sudah mapan untuk membantu pembiayaan.

Setiap bulan, kata Heru, lewat wadah ini juga dilakukan pendampingan termasuk memfasilitasi inventor jika hendak mengikuti kegiatan lomba inovasi seperti Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang digelar Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya itu, berbagai hasil penelitian termasuk inovasi juga didiseminasikan secara luas melalui website. Bappeda Litbang juga menerbitkan jurnal dan buku untuk mewadahi berbagai hasil riset.



Anak-anak mementaskan kesenian dalam rangkaian kegiatan Pasar Papringan yang digagas pemerintah Kabupaten Temanggung. DOK/PEMDA TEMANGGUNG

Heru mengatakan, Bappeda Litbang mengaku sering melibatkan anggota binaan Forum Masyarakat Pecinta Iptek dalam kegiatan akbar soal perencanaan, misalnya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Mereka diminta untuk memamerkan berbagai kreasi inovasi, sehingga merasa didukung oleh pemerintah daerah.

Peningkatan inovasi salah satunya juga dengan memberdayakan mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Wonogiri. Saat penerimaan, mereka difasilitasi di pendopo bupati sebagai bentuk penghargaan. Di akhir masa KKN, mahasiswa akan memaparkan inovasi yang telah diterapkan di daerah binaannya. Dia mengatakan, dengan program ini berbagai inovasi bermunculan. Komunikasi dengan mahasiswa juga tetap terjalin, meski mereka telah merampungkan KKN-nya. “Komitmen Bapak Bupati, saat datang diterima ada pengarahan (ke mahasiswa KKN), begitu selesai nanti ada presentasi,” ujarnya.

Dari 336 inovasi daerah yang masuk

dalam IID, beberapa di antaranya berasal dari Bappeda Litbang. Salah satu inovasi itu, yakni *refocusing* berbasis *outcome*. Bappeda Litbang akan kembali memfokuskan perencanaan yang telah disusun. Dampaknya, bisa menggabungkan beberapa program karena *outcome*-nya serupa atau tidak fokus sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program tersebut otomatis akan terhapus dari sistem. Dengan begitu, kegiatan di Kabupaten Wonogiri bakal tetap sejalan dengan visi misi yang ada di dokumen lima tahunan tersebut.

Meski berhasil menghimpun inovasi dalam sistem IID, Heru mengaku dalam perjalanannya menemui beberapa sandungan. Misalnya, mengenai waktu pengumpulan kelengkapan data inovasi baik dari PD, sekolah, maupun masyarakat. Seringnya pengumpulan itu tak sesuai jadwal yang ditentukan. Langkah yang ditempuh Bappeda Litbang yakni mengundang PD dan masyarakat secara berkala. “Hari pertama PD, hari kedua kita undang yang di sektor pelayanan publik, hari ketiga

mengundang sekolah, hari keempat kita mengundang masyarakat,” ujarnya. Ini lebih efektif ketimbang sekadar mengandalkan pemberian surat.

### Kabupaten Temanggung

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung, Ripto Susilo, mengatakan terkait dengan inovasi, Bappeda berupaya mendorong masing-masing PD agar setiap tahunnya melahirkan paling sedikit satu inovasi. Inovasi itu kemudian dilombakan di tingkat perangkat daerah yang dinilai oleh juri independen. Kedua, selain lomba di tingkat perangkat daerah, Kabupaten Temanggung menggelar lomba Krenova yang diikuti oleh masyarakat. Para inventor dari Kabupaten Temanggung juga maju di ajang Krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ketiga, yang menurutnya penting yakni menginternalisasi ide masyarakat menjadi program pemerintah. Ripto mencontohkan, Kabupaten Temanggung memiliki Komite Ekonomi Kreatif. Mereka difasilitasi pemerintah daerah

menggelar diskusi sebagai upaya menyerap ide dari masyarakat.

Ripto menjelaskan, dalam menyerap ide inovasi, pemerintah kabupaten (pemkab) tidak mengubah gerakan sosial yang sudah ada di masyarakat. Pemkab justru mendampingi dan memfasilitasi ide-ide yang tumbuh. “Kalau masyarakat ada yang berinovasi di bidang pendidikan kita dampingi, kita diskusi seperti apa kemudian kita *sharing* pendapat. Kemudian kita perbaiki bersama-sama,” katanya.

Kerja sama dengan gerakan masyarakat menjadi kunci tumbuhnya berbagai inovasi di Kabupaten Temanggung. Ripto menyebutkan beberapa kekeliruan yang kerap pemerintah lakukan dalam memandang gerakan masyarakat. Pertama, pemerintah seringkali merasa lebih pintar ketimbang masyarakat. Padahal menurutnya, tidak sepenuhnya seperti itu. Dia justru mengakui, banyak ide yang hebat lahir dari masyarakat. Kedua, pemerintah tak jarang menanyakan kontribusi kegiatan dari ide masyarakat terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, katanya, yang terpenting adalah memberi dukungan terhadap ide yang berkembang.

Kedua kekeliruan itu yang dihindari oleh Kabupaten Temanggung. Ripto mengaku, selama ini Kabupaten Temanggung tidak pernah memperlakukan kontribusi ide yang ditampung terhadap keuntungan bagi PAD. “Yang penting kita bisa *support* apapun kemampuannya, kalau bisa *support* dana kita *support* dana, kalau enggak kita dampingi dari sisi dia bergerak,” katanya. Itu menjadikan masyarakat merasa dimanusiakan, sehingga termotivasi untuk terus berkolaborasi.

Ripto mengatakan, inovasi yang dilombakan dalam gelaran IGA 2020 tak sedikit yang dihasilkan dari kolaborasi masyarakat dengan pemerintah. Ia mencontohkan di bidang pendidikan. Masyarakat resah dengan pendidikan yang dialami

oleh anak miskin. Sebab tak sedikit dari mereka yang kesulitan untuk bersekolah.

Persoalan itu kemudian didiskusikan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Temanggung. Dari pertemuan ini, kemudian menghasilkan program beasiswa Tuntas SLTA untuk menyekolahkan anak-anak lulusan SLTP yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA. “Mulai dari pendaftaran, biaya sekolah, biaya seragam, pembelian peralatan sekolah, biaya hidup, kalau dia ngekos dibayari kosannya, kalau dia pulang ke rumah biaya *transport*-nya,” ujarnya. Bila anak-anak tersebut lulus dan mendapatkan pekerjaan yang bagus, maka ia wajib peduli terhadap anak-anak miskin generasi berikutnya.

Ripto menerangkan, salah satu sumber pendanaan Baznas adalah dari zakat yang disalurkan ASN. Sebelumnya, setiap tahun zakat yang dikumpulkan dari ASN Kabupaten Temanggung hanya sekira Rp 100 juta sampai Rp 150 juta di Baznas kabupaten. Namun, sejak berbitnya Peraturan Bupati yang mewajibkan ASN menyalurkan zakatnya ke Baznas sebanyak 1 persen dari total 2,5 persen kondisi itu berubah. Dengan kebijakan ini, Baznas berhasil mengumpulkan zakat dari ASN setiap tahunnya hampir Rp 7 miliar. Ini yang menjadi modal untuk mendukung gerakan beasiswa Tuntas SLTA.

Selain bidang pendidikan, inovasi lain misalnya di bidang ekonomi. Salah satu inovasi di bidang ini, yaitu mengubah kebun bambu menjadi pasar tradisional. Ripto mengatakan, Pemkab mendukung *m u n c u l n y a* ide tersebut, seperti dengan *m e n y e d i a k a n* tempat parkir dan akses menuju pasar tersebut.



Dukungan itu termasuk dalam rembuk yang mempertemukan inisiator dengan organisasi lain agar bisa berkolaborasi.

Saat ini pasar yang diberi nama Papringan itu telah berjalan dan menjadi daya tarik masyarakat yang mengunjungi Kabupaten Temanggung. Aneka jajanan tradisional diujakan, termasuk beragam dagangan lainnya yang berasal dari Kabupaten Temanggung. Suasana kebun bambu dipertahankan, dan transaksi menggunakan alat tukar khusus berbahan bambu yang nilai tukar rupiahnya sudah ditentukan. “Kemurniannya kita jaga, sehingga di situ ada perputaran ekonomi,” katanya.

Sejak akhir 2018, Bappeda membangun komunikasi bersama perangkat daerah dan masyarakat untuk berinovasi. Inovasi kata Ripto tak harus mewah, yang terpenting mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Ripto menjelaskan, dalam melakukan pengisian IID, Bappeda mengumpulkan seluruh perangkat daerah di lab komputer yang dimiliki Pemkab. Dengan begitu, Bappeda mudah mendamping sekaligus mengarahkan dalam pengisian data. Data-data yang terkumpul dari PD tetap dilakukan verifikasi oleh Bappeda untuk mengkoscek kelengkapan data. Namun dirinya mengaku dalam pengisian IID tersebut tidak menemui kesulitan yang berarti.

Berdasarkan data IID, Kabupaten Temanggung berhasil menginput 115 inovasi daerah. Jumlah itu terdiri dari 21 inovasi pelayanan publik, 9 inovasi tata kelola pemerintahan daerah, dan 85 inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

**Kota Palembang**

Sementara itu, salah satu kota yang baru masuk dalam deretan nominator IGA yakni Kota Palembang. Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi, mengatakan keberhasilan daerahnya menjadi nominasi IGA 2020 tak terlepas dari komitmen dan kerja keras pimpinan. Dirinya kerap bertanya-tanya mengapa daerah lain bisa masuk dalam ajang IGA, sedangkan Kota Palembang justru sebaliknya. Dia menyadari dan sepakat bahwa inovasi sudah semestinya dilakukan oleh masing-masing PD, sekalipun tanpa penghargaan.



Dengan inovasi, tugas pokok dan fungsi PD bakal kian maksimal, seperti cepat dalam melakukan pelayanan.

Kendati inovasi masih menjadi tugas yang perlu diselesaikan, tetapi ia meyakini masing-masing PD sebenarnya telah berinovasi. Sebab dia ragu dalam sebuah pelayanan tanpa menerapkan inovasi. Pesan pentingnya inovasi kata Harrey, secara eksplisit sudah termuat dalam RPJMD Kota Palembang. Pesan yang dimaksud Harrey, yakni mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi. Terlebih, Wali Kota Palembang, Harnojoyo kerap berpesan agar PD tidak hanya bekerja dengan cara biasa, seperti sekadar menjalankan rutinitas tanpa berinovasi. Namun sayangnya, berbagai inovasi yang dimiliki PD itu berserakan dan tidak terdaftar dalam sistem IID. Ini yang membuat skor IID Kota Palembang rendah.

Dengan kondisi itu, Bappeda Litbang segera tancap gas untuk mengumpulkan seluruh inovasi yang ada di PD. Harrey mengaku, sebelum mengajak PD lain memperhatikan inovasi, Bappeda harus mengawalinya lebih dulu. Dirinya meyakini, dengan cara ini PD dapat mempercayai ajakannya

untuk berinovasi dan berpartisipasi dalam mengisi IID. “Saya kalau mau menyuruh orang belajar, pasti kita dulu yang tunjukkan kepada mereka. Masa kita menyuruh orang tetapi kita sendiri tidak punya inovasi saya kira sama dengan bohong,” tegas Harrey.

Satu dari sekian inovasi yang dimiliki Bappeda Litbang itu misalnya, “Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) Kota Palembang” berbasis geospasial tematik. Ini adalah upaya agar dalam penyusunan program penanganan kemiskinan tidak hanya sekadar membantu orang miskin, tetapi langsung memetakannya secara spesifik, misalnya dengan melihat lokasi tempat tinggalnya. Dengan begitu, intervensi program yang mengacu pada hasil analisis aplikasi akan berdampak maksimal.

Ia mencontohkan, masyarakat yang sudah dibantu, tetapi kondisinya tidak kunjung membaik. Menurut hasil analisis SIDAK, ternyata yang bersangkutan tinggal di bantaran sungai, dan sering banjir bila hujan

tiba atau mereka tinggal di lingkungan yang kumuh. Dengan kondisi ini, maka perlu menerapkan program khusus. “Tidak hanya memberikan mereka bantuan modal, tetapi infrastruktur di dalamnya, lampu penerangan, kondisi akses jalan masuk, lingkungan sampah dan sebagainya,” katanya mencontohkan.

Selain itu, dalam penanganan pandemi Covid-19, Bappeda Litbang juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi membangun portal tanggap Covid-19 berbasis geospasial. Portal yang menerapkan *Geographic Information System* (GIS) ini diluncurkan sebagai bentuk keterbukaan publik. Portal ini akan selalu memperbarui informasi mengenai Covid-19 setiap waktu. Tak hanya soal dampak kesehatan, inovasi ini juga memuat informasi data warga miskin baru, infografis, panduan hidup sehat, analisa keterisian rumah sakit, dan data pasien penyakit berat. Publik juga dapat ikut menyampaikan berbagai hal perihal kondisinya, lewat kolom survei dan laporan dalam laporan portal tersebut. Ini

akan menjadi pemandu kebijakan Kota Palembang dalam menangani Covid-19.

Dengan berbagai inovasi dan pengawalan yang dilakukan Bappeda Litbang dalam mengisi data IID, daerah ini berhasil lolos sebagai nominasi. Menurut data yang dihimpun IID, Kota Palembang berhasil menginput 204 inovasi daerah. Jumlah itu dengan rincian, 160 inovasi pelayanan publik, 10 inovasi tata kelola pemerintahan, dan 34 inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Harrey mengapresiasi gelaran IGA yang dilakukan Kemendagri. Meski tanpa berkompetisi, sudah semestinya daerah berinovasi sebagai langkah meningkatkan kinerjanya. Namun, melalui ajang ini daerah semakin

■ Pemanfaatan Inovasi-Portal Giscovid-19 Kota Palembang oleh SATGAS Covid-19 Kota Palembang



terpacu untuk bisa terus berinovasi.

**Timbul tenggelam**

Menanggapi timbul tenggelamnya daerah dalam ajang IGA, baik Heru, Ripto, maupun Harrey memiliki sikap yang nyaris serupa, yakni berkomitmen untuk menjaga konsistensi berinovasi. Dengan cara ini, diharapkan dapat bisa eksis dalam laga IGA.

Heru menilai, sudah saatnya inovasi menjadi gerbang kesejahteraan masyarakat. Melalui inovasi akan muncul usaha-usaha baru, misalnya di bidang olahan pangan. Bappeda Litbang Kabupaten Wonogiri akan terus berkomitmen untuk mendorong inovasi, seperti melalui gelaran lomba di tingkat kabupaten. Pada tahun berikutnya, lomba serupa akan terus ditingkatkan dan dibenahi. Komunikasi dengan Forum Masyarakat Pecinta Iptek juga terus dijaga. Komunikasi itu dibutuhkan agar bisa berdiskusi dan menata langkah inovasi yang perlu dikerjakan di tahun berikutnya. “Jadi komitmen pemerintah daerah ini yang harus terus dibangun,” pungkas Heru.

Hal senada juga dilakukan Kabupaten Temanggung. Melalui pendekatan kolaborasinya bersama gerakan masyarakat, Kabupaten ini terus berupaya menumbuhkan inovasi-inovasi baru. Di samping itu, kegiatan yang mendukung inovasi juga terus mendapat dukungan dari pemerintah setempat.

Sementara itu, Bappeda Litbang Kota Palembang bertekad akan menjaga konsistensi upaya inovasi, dengan melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap PD. Harrey berharap, daerahnya tidak terjebak dalam fenomena timbul tenggelam. “Saya kira dengan cara begitulah bisa memastikan bahwa inovasi di masing-masing PD bisa secara konsisten terus melakukan pembaruan, perbaikan, untuk menyempurnakan mungkin dan lain sebagainya,” katanya.

■ MUJAENI



# IKHTIAR INOVASI DARI TEPI

SEMANGAT INOVASI TAK HANYA DITUNAIKAN OLEH DAERAH-DAERAH DENGAN KONDISI MAPAN. DAERAH YANG BERADA DI PINGGIRAN JUGA TAK SURUT UNTUK BERINOVASI. DENGAN INOVASI, MEREKA BERUPAYA MEMBERI PELAYANAN TERBAIK DI TENGAH KETERBATASAN.

SEJUMLAH murid Sekolah Dasar (SD) memanfaatkan fasilitas pustaka kapal apung, yang digagas pemerintah daerah Bintan. PHOTO/ PEMDA BINTAN

**G**ELARAN *Innovative Government Award* (IGA) tak hanya mengakomodasi daerah yang kondisinya mapan. Daerah dengan status perbatasan dan daerah tertinggal yang berinovasi juga turut diakomodasi dengan menyediakan kategori khusus. Tahun ini, di dua kategori muncul nama baru misalnya Kabupaten Bintan dan Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Bintan merupakan daerah yang berada di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Sedangkan Kabupaten Pesisir Barat, merupakan kabupaten yang belum lama terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Pembentukan itu berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Dengan upaya inovasi yang dilakukan, tahun ini keduanya berhasil melenggang ke deretan nominasi penerima IGA.

Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan Mohd. Setioso menjelaskan, Bintan merupakan daerah yang topografinya didominasi oleh laut. Ia menyebutkan sebanyak 98 persen Kabupaten Bintan berupa lautan, dan sisanya berupa daratan. Dengan kondisi seperti itu, pelayanan kepada publik menjadi tantangan, sehingga membutuhkan inovasi dalam pelaksanaannya.

Menurut data Indeks Inovasi Daerah (IID), Kabupaten Bintan berhasil mengumpulkan 72 inovasi daerah, terdiri dari inovasi tata layanan publik sebanyak 14 inovasi, tata kelola pemerintahan 14 inovasi, dan 44 inovasi lainnya. Setioso mengatakan, jumlah tersebut terkumpul berdasarkan inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan Bapelitbang dengan menggandeng perguruan tinggi.

Setioso menjelaskan, dengan topografi Kabupaten Bintan berupa kepulauan, membuat proses identifikasi inovasi memiliki tantangan tersendiri. Terlebih, proses itu dilakukan di tengah pandemi. Namun, Bapelitbang tetap berupaya menjalin komunikasi dengan berbagai PD yang memiliki inovasi. “Karena masa pandemi, tatap mukanya secara terbatas, untuk daerah yang jangkauan jauh dilakukan dengan *Zoom Meeting*,” tutur Setioso saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).

Mengoordinasikan PD untuk turut berpartisipasi dalam inovasi daerah bukan perkara mudah, terlebih Bapelitbang memiliki kedudukan yang sama dengan perangkat daerah lainnya. Namun, beruntung, komitmen kepala daerah untuk mendukung inovasi begitu besar, sehingga beberapa sandungan bisa teratasi. Setioso mengatakan, sebulan sekali pemerintah kabupaten (pemkab) menggelar forum bersama untuk membahas capaian kinerja sekaligus melakukan evaluasi sebagai bahan pembenahan. Dalam forum itu, Bapelitbang kerap diberi kesempatan untuk menyampaikan perkembangan inovasi daerah beserta hambatannya. “Dalam hal ini kita sampaikan, *brainstorming*-nya lah kepada PD,” kasi-

tanya. Dengan penjelasan ini, PD Kabupaten Bintan dapat memahami apa saja yang perlu dilakukan untuk mendukung tumbuh kembangnya inovasi daerah.

Sebagai koordinator inovasi daerah, Bapelitbang berusaha membangun iklim inovasi di masing-masing PD. Setioso menjelaskan, upaya ini dilakukan dengan memfasilitasi PD melalui forum konsultasi secara rutin. Konsultasi tak hanya berlaku bagi perangkat daerah, tetapi juga masyarakat yang memiliki ide inovasi. Dari forum ini, maka akan menghasilkan beragam rekomendasi inovasi yang dapat diterapkan. Berbagai ino-



■ Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan menyalurkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis.

vasi yang telah diterapkan akan terus dievaluasi Bapelitbang. Hal ini untuk memastikan tata kelola pemerintahan tetap sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Bapelitbang juga menyusun *roadmap* tentang sistem inovasi daerah Kabupaten Bintan. *Roadmap* ini berperan sebagai pedoman bagi Pemkab dalam membangun inovasi daerah.

Dari 72 Inovasi yang masuk dalam IID, beberapa di antaranya berasal dari Bapelitbang. Salah satu inovasi itu misalnya Sikemas atau Survey

Kepuasan Masyarakat. Inovasi berbasis elektronik ini lahir dari kesadaran bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah harus mendapat masukan dari masyarakat. Secara teknis, melalui aplikasi ini masyarakat memberi masukan atas kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan begitu, layanan yang dinilai perlu perbaikan dapat segera dibenahi agar manfaatnya lebih meningkat.

Selain itu, ada pula inovasi *e-planning* yang membantu proses perencanaan program di Kabupaten Bintan. Dengan inovasi ini tingkat akurasi perencanaan bisa lebih maksimal dan data eror bisa diminimalkan. “Dengan *e-planning* adanya data eror bisa dikurangi,” terang Setioso. Dampaknya, perencanaan akan lebih terukur dengan mengacu pada RPJMD.

*E-planning* juga dapat membuat pembangunan bisa berjalan secara berkelanjutan. Dia mencontohkan, jika ada pembangunan yang tak rampung di tahun anggaran berjalan, dengan mengacu data *e-planning* program itu dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Inovasi ini, bisa juga berperan sebagai wadah inventarisasi usulan program untuk tahun berikutnya. “Misalnya, tahun lalu masyarakat Kecamatan Bintan Timur memasukkan pembangunan dermaga, karena kita tidak cukup anggaran, berarti di tahun depan kita harus prioritaskan,” tambahnya.

Ada pula inovasi Organisasi Kelitbangan yang disingkat Oralit. Inovasi ini merupakan aktualisasi dari kolaborasi dengan lembaga *think tank*, yakni antara pemerintah daerah Kabupaten Bintan, Bapelitbang bersama tenaga

kelitbangan dari perguruan tinggi dalam rangka menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang. Dari kegiatan ini kemudian dapat memberikan stimulus rancang bangun serta budaya riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### Menyerap aspirasi

Keberhasilan inovasi di daerah, tak terlepas dari peran kepala daerahnya. Setioso menceritakan, Bupati dan aparat sipil negara (ASN) Kabupaten Bintan kerap melakukan perjalanan untuk melihat kondisi masyarakat. Bahkan tak jarang, dalam perjalanannya rombongan memilih untuk menginap di perkampungan dan berbaur bersama masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum menyerap aspirasi masyarakat terkait inovasi yang dimiliki Bintan,



■ Pegawai Pemda Pesisir Barat tengah menggunakan aplikasi SiKAMDO

termasuk masukan terhadap bentuk inovasi baru. “Di situ masyarakat muncul segala macam permasalahan, dan kita sebagai perangkat daerah mencoba meramu permasalahan tersebut dan mencari cara mengatasinya. Dan muncullah dari situ inovasi apa yang bisa diterapkan,” katanya.

Menjaring inovasi yang dibutuhkan masyarakat tak hanya dilakukan oleh eksekutif. Proses penyerapan aspirasi juga dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bintan. Penyerapan aspirasi itu dilakukan misalnya saat menjalani masa reses. Usai menampung semua keluhan masyarakat, DPRD

akan mengajak PD untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Dengan terbangunnya kerja sama eksekutif dan legislatif ini terbangun pula komitmen untuk mendukung lahirnya berbagai inovasi, termasuk dalam proses perencanaan dan penetapannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Setioso menambahkan, dukungan anggaran tak hanya bersumber dari APBD. Sumber pendanaan lainnya datang dari forum *corporate social responsibility* (CSR) yang dibentuk oleh pemkab. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kabupaten Bintan sering melibatkan peran swasta. Pelibatan itu misalnya dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Alasan pelibatan tersebut, karena pemkab sadar untuk membangun kemajuan

tidak hanya mengandalkan rupiah dari APBD. Namun, perlu juga dukungan dari swasta melalui program CSR.

### Kabupaten Pesisir Barat

Masuknya Kabupaten Pesisir Barat dalam deretan nominasi IGA 2020 merupakan buah dari upaya yang dilakukan daerah tersebut. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Barat, Zukri Amin meyakinkan, meski 2019 belum masuk dalam IGA, bukan berarti daerahnya tidak berinovasi. Sebelum mengikuti ajang IGA, PD Kabupaten Pesisir Barat diakui telah melakukan banyak inovasi. Merujuk pada data IID, Kabupaten Pesisir Barat berhasil menginput 61 inovasi daerah dalam IGA 2020.

Zukri menceritakan, awalnya Bappeda sempat mengurungkan untuk berpartisipasi dalam ajang IGA 2020. Ia berniat ingin lebih dulu melakukan pem-

benahan inovasi yang sudah berjalan agar hasilnya lebih maksimal. Predikat sebagai kabupaten baru, sempat menjadi salah satu alasan, mengapa terlintas keinginan untuk menunda pengisian data ke dalam sistem IID. Namun, pada akhirnya Bappeda memilih untuk berpartisipasi. Pasalnya, dengan ikut dalam ajang tersebut justru akan mampu melihat kekurangan yang ada. Dengan begitu, pembenahan inovasi daerah dapat segera dilakukan.

Di sisi lain, kata Zukri, PD terlihat sudah tergugah untuk memperhatikan inovasi. Sebagai koordinator inovasi di daerah, Bappeda berusaha mengawal jalannya inovasi daerah termasuk memberikan dukungan kebutuhan. Terlebih, ia menyadari melalui inovasi akan dapat memaksimalkan tugas dan fungsi masing-masing PD. Dalam melakukan pengisian data IID, Bappeda mengawal dan memastikan inovasi masing-masing PD terinput ke dalam sistem. Dirinya mengaku tak menyangka apa yang dilakukan Kabupaten Pesisir Barat membuahkan hasil dengan lolos sebagai nominasi penerima IGA 2020.

Mengkoordinasi PD untuk berpartisipasi dalam agenda tidak mudah, sehingga membutuhkan strategi ampuh untuk menanganinya. Zukri mengatakan, setiap kali stafnya mengaku menemui kendala dalam melakukan koordinasi dengan PD, dirinya langsung menghubungi kepala PD yang bersangkutan. Dengan komunikasi itu, hambatan di lapangan bisa teratasi. “Koordinasi itu mudah diucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya perlu penyesuaian. Namun itu yang saya lakukan, jika antar-staf ada kendala maka saya langsung menghubungi kepala dinas lewat sambungan telepon,” katanya.

Inovasi daerah memerlukan dukungan dan komitmen dalam pemerintah daerah. Tanpa dukungan itu, jalannya inovasi di daerah menjadi terhambat. Zukri mengatakan, Bupati Pesisir Barat mendukung dan mendorong agar PD terus berinovasi dan berpartisipasi dalam ajang IGA. Tanpa ada dorongan tersebut, gerak kerja agak lambat. Bupati, katanya, selalu mewanti-wanti agar PD mampu memberikan pelayanan secara maksimal, seperti cepat, mudah, dan gratis. “Kita hapus stigma lama, kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat. Itu sudah usang, dan malah dosa,” katanya.



Dalam membangun inovasi, Pesisir Barat juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kerja sama itu berupa penandatanganan nota kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk

membantu pemkab dalam melakukan pembangunan. Ia mencontohkan, misalnya di bidang riset maupun kegiatan sosial. Sinergitas PD, perguruan tinggi, dan masyarakat diperlukan dalam melakukan percepatan pembangunan. Dengan begitu, dirinya berharap Pesisir Barat segera keluar dari daerah dengan status tertinggal.

Salah satu inovasi yang menjadi unggulan Kabupaten Pesisir Barat adalah SiKAMDO (Sistem Kendali Administrasi Media Diskominfo Online). Inovasi ini dibuat untuk melayani kerja sama antara media massa dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui layanan ini, komunikasi dapat dilakukan dua arah secara daring sebagai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan perkembangan industri 4.0. SiKAMDO akan membantu teknis kerja sama, mulai dari pendaftaran, pengiriman berkas administrasi, pengiriman bukti

tayang, serta pengarsipan data. Dengan adanya layanan ini diharapkan mampu mengarsipkan berkas administrasi media massa secara digital dan akuntabel.

Inovasi ini respons atas banyaknya media massa yang mengajukan permohonan kerja sama. Sementara, dokumen pengajuan kerja sama masih berupa *print-out* (fisik), sehingga menyulitkan pencarian dan pengarsipan data. Di sisi lain, sumber daya manusia dan ruang penyimpanan dokumen fisik terbatas. Karenanya, inovasi dalam menangani kerja sama ini dibutuhkan.

Dengan inovasi ini berbagai manfaat telah dirasakan. Manfaat itu misalnya, arsip pengajuan kerja sama media termasuk berkas administrasi serta bukti tayang media berupa data digital. Dengan demikian, memudahkan dalam pencarian dan pengarsipan serta dapat diakses tak terbatas ruang dan waktu dengan mengandalkan gawai maupun komputer. Kinerja pelayanan aparatur dalam bidang administrasi kerja sama media juga menjadi lebih baik dan efektif. Dengan inovasi ini, maka tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi.

Sementara itu, terkait peluang replikasi oleh daerah lain, SiKAMDO telah menjadi bahan studi banding beberapa daerah Provinsi Lampung, seperti Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Beberapa kabupaten lainnya juga sudah menjalin komunikasi.

Menanggapi fenomena timbul tenggelamnya daerah dalam ajang IGA, Kabupaten Pesisir Barat sudah menyiapkan inovasi yang bakal menjadi unggulan di tahun berikutnya. Saat ini, inovasi yang dimaksud terus mengalami perbaikan, sehingga hasilnya lebih maksimal. Zukri menegaskan, jangan sampai agenda yang begitu padat justru membikin terlena pentingnya berinovasi. “IGA ini kan setiap tahun, jangan sampai terputus gitu,” pungkasnya.

■ MUJAJENI

LEBIH DEKAT

# Menata Reformasi Birokrasi

Bagi Prof Eko Prasajo membenahi birokrasi adalah hal krusial. Tanpa birokrasi andal, pembangunan tidak dapat berjalan baik. Karenanya, ia konsen mengawal reformasi birokrasi melalui berbagai peran, baik lewat penelitian maupun terlibat dalam struktur pemerintahan. Jabatan yang pernah didudukinya yakni Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia menjadi salah satu orang yang terlibat dalam menyusun berbagai regulasi untuk memperkuat reformasi birokrasi. Salah satu regulasi itu, adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini merupakan gebrakan membenahi tata kelola ASN.

## Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional

Tempat Tanggal Lahir :

Kampar, 21 Juli 1970

Pendidikan :

S-1 di bidang Ilmu Administrasi Publik, FISIP UI pada 1995

S2 Master of Public Administration dari Deutsche Hochschule fur Verwaltungswissenschaften Speyer (Speyer Post-Graduate Program for Public Administration, Germany pada 2000

Meraih gelar doktor di tempat yang sama pada 2003

fokus reformasi birokrasi adalah berkaitan dengan sumber daya manusia. Pria kelahiran Kampar ini, menjadi salah satu orang yang berperan dalam terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Secara regulasi, menurutnya, UU tersebut merupakan momentum membenahi tata kelola ASN karena memiliki paradigma, pendekatan, serta elemen-elemen baru, termasuk berkaitan dengan seleksi terbuka ASN.

Dulu, sebelum adanya UU Nomor 5 Tahun 2014, rekrutmen ASN maupun kenaikan jabatan kerap berdasarkan senioritas, kedekatan dengan pimpinan, dan sistemnya cenderung tertutup. Berkat regulasi ini, ekosistem ASN di Indonesia mulai berbenah. Dampaknya, kini banyak anak muda yang mampu menduduki jabatan strategis, seperti direktur jenderal dan semacamnya. Selain itu, jabatan strategis seperti di tingkat eselon I juga dapat diisi oleh non PNS (pegawai negeri sipil). Ekosistem ini merupakan budaya baru yang lebih kompetitif dan terbuka.

Eko mengusulkan kepada Menteri PAN-RB saat itu Azwar Abu Bakar untuk memperbaiki proses rekrutmen PNS. Eko mengenalkan sistem *Computer Assisted Test* atau sering disebut CAT. Dengan sistem ini, kata Eko, hasil seleksi tidak dapat direayasa. Sebab pemerintah mengantongi lebih dari 40 ribu bank data soal yang bisa diacak. Dengan demikian, setiap orang yang mengikuti ujian, soalnya akan berbeda antara satu dengan lain-

nya. Sistem itu membangun kepercayaan masyarakat, bahwa menjadi PNS tak perlu membayar dan orang-orang yang lolos merupakan mereka yang terbaik.

Dorongan untuk menerbitkan UU tentang ASN juga dilatarbelakangi dengan kondisi lain, salah satunya kooptasi politik di daerah akibat pilkada. Kala menjadi Wamen, Eko mengaku pernah didatangi orang daerah yang mengadu dibebastugaskan, karena dianggap sebelumnya tidak mendukung bupati/wali kota yang memenangi pilkada. Saat itu, lanjut Eko, kooptasi politik terhadap birokrasi memang terkenal di pemerintah daerah. Kepala daerah yang unggul di pilkada kerap membebastugaskan ASN karena dinilai tidak mendukungnya.

Dengan kondisi itu, Eko berpendapat jika mekanisme pengisian jabatan perlu diatur melalui promosi terbuka atau lelang jabatan. Supaya pengangkatan jabatan bukan berdasarkan suka atau tidak suka, melainkan merujuk pada kompetensi. Sebelum ada UU tentang ASN tepatnya pada 2013, Eko mengusulkan kepada Menteri agar Kementerian PAN-RB mengawali pengisian jabatan menggunakan sistem lelang jabatan, untuk menjadi contoh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Usulnya diterima, dan beberapa orang berhasil menduduki jabatan strategis melalui proses seleksi tersebut. Seleksi ini melibatkan *Assessment Center* dan panitia seleksi.

Cara itu kemudian ditiru oleh pemerintah daerah. Meski Eko mengaku mendapat kabar, beberapa kepala daerah mengatur panitia seleksi atau *assessment center* yang bisa dikendalikan. Namun paling tidak, hal itu telah ditanggulangi dengan adanya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang melakukan pengawasan. Meski ia tahu, tak sedikit politisi yang berjuang untuk membubarkan KASN dan merevisi UU tentang ASN. "Kami kan kepala daerah, masa enggak punya wewenang untuk mengganti, mengangkat, menggeser ASN," tutur Eko menirukan alasan yang kerap digunakan.

Selain itu, ia menambahkan, dengan UU tentang ASN, jabatan eselon I dan II memiliki batas maksimum selama 5 tahun. Jika yang bersangkutan berkeinginan untuk duduk kembali, maka mesti mengikuti *assessment* seperti saat awal mendaftar. Kalau tidak cocok dengan jabatan tersebut, yang bersangkutan berhak mengikuti lelang jabatan di tempat lain. Bila jabatan strukturalnya tidak tersedia, maka bisa beralih mengisi jabatan fungsional.

### Pemangkasan eselon

Terkait reformasi birokrasi, pada periode kedua, Presiden Joko Widodo menginginkan struktur birokrasi pemerintahan yang lebih ramping. Langkah itu diambil agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien, terutama dalam menunjang investasi yang saat ini dinilai lesu akibat proses perizinan yang tak cepat. Dengan struktur yang ramping, diyakini mampu melipat proses pengambilan kebijakan, sehingga agenda pembangunan lekas terwujud. Guna merampingkan struktur itu, Presiden mengarahkan agar level di tiap lembaga pemerintahan disederhanakan, dari semula empat level menjadi dua level menyisakan eselon I dan II. Sementara untuk eselon III dan IV bakal dialihkan menjadi pejabat fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi.

Eko Prasajo mengatakan, wacana pemangkasan eselon III dan IV sudah muncul saat dirinya menjabat sebagai Wamen PAN-RB. Salah satu dari sembilan percepatan reformasi birokrasi yang diusulkannya, adalah menyangkut pemangkasan eselon. Langkah itu untuk memperpendek pengambilan keputusan

dan kebijakan. Selain itu, agar pegawai berorientasi pada fungsi dan kompetensi. Kala itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah mengurangi 145 jabatan eselon III dan IV yang dipindahkan sebagai auditor. Kementerian PAN-RB juga bertahap melakukan rasionalisasi.

Terkait dengan peralihan jabatan struktural ke fungsional sebenarnya tak terlalu menyulitkan, meski tetap harus dilakukan dengan langkah pertimbangan. Eko menyebutkan, saat seseorang ingin menjadi PNS yang ditekankan adalah latarbelakang pendidikan. Artinya, saat melakukan rekrutmen, seseorang itu duduk di jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. "Misalnya dicari sarjana ekonomi jurusan akutansi, berarti

“

PEMANGKASAN ESELON III DAN IV PERLU MEMIKIRKAN DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL PENGGANTI DARI JABATAN STRUKTURAL YANG DIPANGKAS. INI MEMANG TAK MUDAH

dia keahliannya pada akutansi. Nah itu kemudian, begitu masuk birokrasi berubah, semua orang jadi pengen pejabat struktural," katanya. Padahal jumlah jabatan struktural terbatas dibanding dengan jumlah PNS. Akibatnya, mereka bersaing secara tidak sehat dan berdampak pada kurang dimilikinya standar kompetensi.

Dia menjelaskan, pemangkasan eselon III dan IV perlu memikirkan daftar jabatan fungsional pengganti dari jabatan struktural yang dipangkas. Ini memang tak mudah, karena seseorang menjabat eselon III tidak dalam waktu singkat, sehingga kompetensi di bidangnya nyaris hilang karena lebih sering mengurus pekerjaan struktural. "Menurut saya silakan pemerintah nanti bisa membuat skema, apa yang menjadi minat yang bersangkutan untuk duduk dalam jabatan fungsional seperti apa," tuturnya. Selain minat, yang perlu diperhatikan adalah proses pelatihan. Eko Prasajo menduga, 60 persen dari jabatan eselon III dan IV yang menjadi fungsional akan berkaitan

dengan analisis kebijakan. Oleh karena itu, pelatihan perlu diberikan untuk menyiapkan pengisian jabatan tersebut.

### Akademisi

Selain sebagai mantan Wamen PAN-RB, Eko Prasajo merupakan seorang akademisi. Ia adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dengan kepakaran di bidang kebijakan publik yang mendorong pada reformasi birokrasi berbasis IT (*Information Technology*). Dia menjadi profesor termuda di FISIP UI kala masih berumur 33 tahun.

Sebagai guru besar, Eko berkeinginan memperkuat berbagai penelitian yang berkaitan dengan kualitas pemerintahan dan birokrasi. Penelitian itu tak hanya melihat Indonesia, tetapi juga membandingkannya dengan berbagai negara. Dirinya ingin apa yang dilakukan dari penelitian, teori, pengalaman dengan berbagai koleganya dari dalam maupun luar negeri bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Manfaat itu seperti menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia. Kesempatan itu terbuka, terlebih Eko Prasajo saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi. "Saya selalu memberi masukan kepada Menteri PAN-RB, kepada Bapak Wakil Presiden berkaitan dengan reformasi birokrasi," ujarnya.

Eko bertekad, agar ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat membenahi birokrasi di Indonesia. Paling tidak, dapat menopang kemajuan ekonomi. Birokrasi, kata Eko, memiliki peran yang sangat krusial. Tanpa dilakukan pembenahan, maka tidak mungkin mewujudkan ekonomi yang baik. Terlebih bila birokrasi tidak kompeten apalagi korup. Ia menyebutkan, potensi inefisiensi di Indonesia masih terbilang tinggi. Kementerian PAN-RB pernah menghitung angka inefisiensi itu sekira Rp 400 triliun. "Ini bukan kerugian keuangan negara, tetapi inefisiensi," kata Eko. Pangkalnya, banyak program dan kegiatan tidak berorientasi pada *outcome* dan *impact* yang jelas.

Dengan berbagai persoalan yang masih menggelayut itu, membikin Eko kian terpacu memberikan berbagai sumbangsih pembenahan.

■ MUJAJENI

# Memodifikasi SDGs Versi PBB

*PBB dan Desa barangkali adalah dua kata yang terlalu jauh untuk dikaitkan satu sama lain. Yang pertama terkesan mendunia, internasional dan global, sementara yang kedua punya kesan setempat dan lokal.*

**OLEH HARI TAQWAN SANTOSO**

MESKI begitu, dengan menarik benang merah-benang merah yang sangat khusus, akan menjadi jelas bahwa hubungan antara kedua entitas tersebut tidak sejauh kesan yang dimunculkan.

Salah satu di antara benang merah itu adalah pertemuan PBB bertajuk *Sustainable Development Summit*, 25-27 September tahun 2015, yang kemudian menyepakati dan mengesahkan dokumen berjudul Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs). SDGs adalah sebuah agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target yang saling terkait, saling memengaruhi, inklusif dan terintegrasi satu sama lain, universal atau tidak satu orang pun terlewatkan (*no one left behind*), dengan jangka waktu penyampaian hingga tahun 2030. SDGs merupakan komitmen masyarakat internasional, tonggak baru pembangunan negara-negara untuk kehidupan manusia supaya menjadi lebih baik (hlm. 8). Ke-17 SDGs tersebut adalah: *No Poverty* (Menghapus Kemiskinan), *Zero Hunger* (Mengakhiri Kelaparan), *Good Health and Well-being* (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), *Quality Education* (Pendidikan Bermutu),

*Gender Equality* (Kesetaraan Gender), *Clean Water and Sanitation* (Akses Air Bersih dan Sanitasi), *Affordable and Clean Energy* (Energi yang Bersih dan Terjangkau), *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), *Industry, Innovation and Infrastructure* (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), *Reduced Inequality* (Mengurangi Ketimpangan), *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan), *Responsible Production and Consumption* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab), *Climate Action* (Penanganan Perubahan Iklim), *Life Below Water* (Menjaga Ekosistem Laut), *Life on Land* (Menjaga Ekosistem Darat), *Peace, Justice and Strong Institutions* (Kedamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat), *Partnerships for the Goals* (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Agenda besar PBB yang tertuang dalam SDGs tersebut mencakup semua aspek pembangunan yang bercita-cita ideal, namun dalam praktiknya tidak bisa serta merta dipukul rata di seluruh dunia. Pembangunan berdasar SDGs di Indonesia, misalnya, tidak bisa disama-ratakan dengan pembangunan berdasar SDGs di AS, Jepang, atau negara-negara di Afrika. Hal ini dikarenakan setiap negara mempuny-



**SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan**

**Penulis:** A. Halim Iskandar

**Penerbit:** Yayasan Obor Indonesia

**Cetakan:** 2020

**Tebal :** 180 + xviii

**Harga :** Rp 70.000,-

nyai demografi serta kondisi ekonomi, sosial dan budayanya masing-masing. Dengan demikian, SDGs versi PBB perlu diterjemahkan ke dalam konteks lokal.

Di sisi lain, pembangunan desa di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak bisa disepelekan. Apa pasal? Selain memiliki sumberdaya yang besar, potensi desa juga mempunyai dua aspek signifikan, yaitu aspek kewilayahan dan aspek kependudukan. Data Kemendagri (2019) menunjukkan bahwa 91% wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan. Selanjutnya, ditinjau dari SDGs, terdapat 11 tujuan yang berkaitan erat dengan kewilayahan desa (Tujuan nomer 7-17). Artinya, aksi di desa menuju tercapainya 11 Tujuan tersebut akan menyumbang 91% keberhasilan menyapai SDGs. Sementara data dari BPS (2000) menunjukkan bahwa 43% penduduk Indonesia tinggal di desa. Apabila ditinjau dari sisi tujuan pembangunan, maka diketahui bahwa ada 6 Tujuan yang berkaitan dengan warga desa (Tujuan 1-6). Artinya, aksi di desa menuju tercapainya keenam Tujuan tersebut akan menyumbang 43% pada penyapaian SDGs (hal. 17). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa akan berkontribusi besar pada pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam buku *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* ini, A. Halim Iskandar memodifikasi SDGs versi PBB sehingga cocok diimplementasikan untuk konteks desa. Proses pelokalan tersebut terbagi dalam beberapa langkah. Pertama, istilah-istilah dan ikon-ikon SDGs disesuaikan dengan kata dan gambar yang lebih membumi dengan masyarakat desa. Misalnya SDGs 01 yang dalam versi PBB adalah *No Poverty* (Menghapus Kemiskinan) dengan simbol ilustratif orang-orang dari segala usia bergandengan tangan, disesuaikan dengan konteks desa menjadi *Desa Tanpa Kemiskinan* dan diberi simbol baru berupa celengan ayam dan satu koin bertuliskan “Rp” di atasnya. Diksi “desa tanpa kemiskinan” dipilih alih-alih “mengakhiri segala bentuk

kemiskinan” atau “menghapus kemiskinan” karena akan lebih mudah diterima warga desa, sebab merujuk langsung pada pembangunan di tingkat desa. Diksi ini juga merujuk pada pernyataan tujuan, bukan suatu proses sebagaimana diindikasikan kata kerja berawalan me- (hlm. 83).

Kedua, selain melokalkan SDGs versi PBB, penulis juga menggagas satu SDG tambahan, yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Gagasan ini tepat, karena meskipun pada tataran konsep mudah untuk memasukkan pembangunan sebagai salah satu perubahan besar bagi masyarakat, namun merasakan hidup di tengah pusaran perubahan itu merupakan tantangan maha dahsyat.

“**KEBERHASILAN PEMBANGUNAN INDONESIA MERUPAKAN AKUMULASI DARI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA-DESA DI SELURUH INDONESIA. KALIMAT INI MENDAPAT JUSTIFIKASINYA, KARENA SEBAGIAN BESAR PERMASALAHAN SEKALIGUS SUMBER-SUMBER KEKAYAAN ADA DI DESA.**”

Pembangunan tidak selamanya tumbuh sejalan dengan/sebagai buah dinamika internal masyarakat, melainkan juga sebagai cangkokan dari luar, yang membutuhkan kapasitas masyarakat untuk menerimanya. Pembangunan kerap dikritik karena meninggalkan masyarakat paling bawah, terutama masyarakat desa, yang sulit mengikuti langkah-langkah pembangunan (hlm. 143). Strategi untuk menghilangkan alienasi pembangunan dari desa mau tak mau ialah mendekatkan seluruh proses (konsep, tujuan, dan pelaksanaan) kepada komunitas desa sesuai dengan perilaku khas sehari-hari yang sudah berlangsung di masing-masing desa (hlm. 144).

Ketiga, melalui buku ini, penulis juga menyerukan bahwa kesadaran dan keterlibatan semua pihak terkait un-

tuk bahu-membahu dan berkolaborasi merupakan kunci strategis mewujudkan SDGs Desa 2030. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal dan berpangku tangan, apalagi berpikir bahwa beban menyapai SDGs desa hanya ada di pundak pemerintah. Semua harus bersinergi, bergotong-royong dan berkampanye, bahwa semua terpenggil untuk ikut serta mewujudkan SDGs Desa. Keberhasilan pembangunan Indonesia merupakan akumulasi dari keberhasilan pembangunan desa-desa di seluruh Indonesia. Kalimat ini mendapat justifikasinya, karena sebagian besar permasalahan sekaligus sumber-sumber kekayaan ada di desa. (hlm. 161).

Namun, kendati semangat untuk mencapai SDGs (khususnya di tingkat desa) yang digaungkan dalam buku ini sedemikian menggebu-gebu, namun mau tidak mau harus diakui bahwa Indonesia lambat dalam hal tanggapan. Lima tahun telah berlalu sejak dokumen SDGs disepakati di bawah naungan aula besar PBB, namun konsep pelokalannya ke konteks desa baru dirumuskan. Belum lagi langkah yang harus ditempuh dalam bentuk program-program aktual di desa-desa. Padahal jangka waktu yang ditetapkan PBB adalah sampai tahun 2030. Hal itu berarti tinggal 10 tahun lagi yang tersisa. Siapa pun tidak akan terlalu optimis bahwa tahun 2030 ke-18 SDGs Desa bisa dicapai. Terlebih, kita semua masih belum selesai berurusan dengan pandemi Covid-19 dan segala akibat yang didatangkannya. Namun, kendati tidak sempat disinggung oleh penulis dalam buku, rintangan-rintangan tersebut tentunya tidak seyogyanya dijadikan alasan untuk menyerah. Pembangunan desa dengan ke-18 SDGs Desa sebagai cita-cita akhir tetap harus dilaksanakan dengan menggerakkan segala upaya.

*\*) Hari Taqwan Santoso, penulis nover dan peresensi buku, bermukim di Yogyakarta.*



## The Queen's Gambit

**Sutradara:**  
Scott Frank

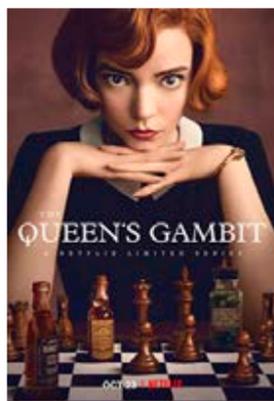
**Pemain:**  
Anya Taylor-Joy  
Bill Camp  
Moses Ingram  
Isla Johnston  
Christiane Seidel  
Rebecca Root  
Chloe Pirrie  
dll

**Produksi:**  
Flitcraft Ltd  
Wonderful Films

**Penulis Cerita:**  
Scott Frank

**Tayang:**

23 Oktober 2020  
(Netflix)



## Ketika Catur Memiliki Pesona Unik

Layanan *streaming* Netflix merilis serial orisinal yang berjudul *The Queen's Gambit* pada 23 Oktober 2020 lalu. Serial tujuh episode ini diadaptasi dari novel setebal 250 halaman karya Walter Tevis dengan judul serupa. *The Queen's Gambit* menceritakan seorang anak yatim piatu, bernama Beth Harmon yang tinggal di panti asuhan. Ketika Beth kecil (Isla Johnston) sedang membersihkan penghapus di Rubanah, ia melihat penjaga gedung bernama Mr. Shaibel (Bill Camp) sedang memainkan catur yang kemudian mengajarnya. Obsesinya terhadap catur membuat ia selalu membayangkan bidak catur sebelum tidur di langit-langit kamarnya.

Seiring berjalannya waktu, Beth tumbuh

menjadi gadis remaja (Anya Taylor-Joy) dan diadopsi oleh Alma Wheatley (Marielle Heller). Saat usianya menginjak 15 tahun, Beth mengikuti pertandingan catur untuk kali pertama. Ia berhasil menyingkirkan lawan-lawannya yang mayoritas laki-laki. Di sana ia juga bertemu cinta pertamanya, Townes (Jacob Fortune-Lloyd). Permainan Beth yang memukau, membawa kemenangan di *Kentucky State Championship*. Karier Beth semakin melonjak. Ia hanya butuh waktu setahun melawan deretan pemain profesional di Amerika. Beth semakin getol melatih kemampuannya bermain catur. Dari dalam hatinya tersimpan rasa untuk selalu menang dan pantang kalah. Mampukah Beth meraih ambisinya untuk menjadi *grandmaster* catur dunia?

Serial *The Queen's of Gambit* sukses berkat komando tunggal dari sutradara sekaligus produser Scott Frank. Netflix mencatat ada sekitar 62 juta pasang mata menonton mahakarya Frank. Pencapaian ini berkat pengemasan apik tiap episode yang ditampilkan. Walaupun bertema episodik, cerita yang dibawakan tersusun rapi dan berkaitan satu sama lain. Istimewanya lagi, penonton yang tidak memahami permainan catur juga tetap bisa menikmati series ini.

Daya tarik utama terletak pada karakter utama Beth Harmon yang diperankan Anya Taylor-Joy yang sukses melakoni karakter wanita ambisius, lugas, dan jenius. Ia mampu menampilkan sisi lain permainan catur sebagai olahraga yang menarik dan penuh trik. Ekspresi yang selalu diingat penonton adalah saat Beth

menyilangkan jari jarinya di bawah dagu, tanda pertandingan akan dimulai. Jajaran artis terkenal yang juga ikut menghiasi layar *The Queen's of Gambit* seperti Thomas Brodie-Sangster, Harry Melling, Moses Ingram, Marcin Dorociński, dan aktor kenamaan lainnya.

*Scoring* yang dimainkan mampu mengacak emosi penonton larut dalam cerita. Nada musik yang dimainkan sangat cocok dengan suasana yang terjadi pada potongan *scene*'nya. *Scoring* favorit adalah saat momen pertandingan catur yang dimainkan Beth Harmon. Irama yang diputar sangat memengaruhi penonton untuk ikut merasakan ketegangan seolah-olah menyaksikan pertandingan secara langsung. Efek *scoring* memiliki andil besar untuk lebih menghidupkan pesan-pesan tersem-

bunyi dari serial ini. Sinematografi yang mewarnai jalannya cerita *The Queen's of Gambit* tak kalah cantik dan menawan. Berlatar tahun 1960'an, tone warna yang ditampilkan terasa nyata dan alami. Penggunaan CGI luar biasa tajam dan detail. Seperti contoh saat Beth berimajinasi papan catur imajiner di langit-langit kamarnya.

*The Queen's of Gambit* mencoba mengemas cabang olahraga yang kurang populer di ranah perfilman menjadi sesuatu yang menyita perhatian. Alih-alih permainan ini untuk pria dipatahkan saat jari jemari Beth Harmon lincah bergerak di atas bidak catur. Bagi Beth, semua yang ada di dalam hidup ini adalah tentang catur "Live to play chess".

■ FARIDA UBAY

## Barang-Barang Mati

Hari Taqwan Santoso\*

Udara pagi yang segar memenuhi rongga-rongga dadaku sedari subuh tadi. Udara yang sama juga menarik kaki-kaki untuk melangkah, berjalan-jalan ke arah sawah ketika jingga di ufuk timur baru merekah.

Orang-orang di seluruh desa, pada dasarnya sudah sibuk beraktivitas, mengawali hari dengan segenap persiapan untuk mengais sesuap nasi. Para petani bersiap dengan sabit dan cangkul, para pedagang mengepak sayur dan bumbu dapur, sementara anak-anak mulai mengguyur badan di kamar mandi sebelum mengenakan seragam sekolah. Hanya aku, pelarian dari kecamuk hiruk-pikuk kota besar ini yang cukup santai untuk berjalan-jalan di pagi hari, dengan mengenakan kaos, celana dan sepatu sport bermerek tanda centang pula.

"Santai sekali dia ya," seorang tetangga yang sedang menyapu halaman dengan punggung membungkuk berbisik. Suaranya sengaja dibuat lirih, supaya aku tak mendengar kata-katanya. Mestinya, dia tidak ingin menyinggungku, tapi juga tidak ingin melewatkan komentar atasku yang punya penampilan dan kegiatan yang sama sekali berbeda dari orang-orang di seluruh desa pagi ini. Namun pendengaranku masih tajam. Aku tidak tuli, meskipun juga tidak peduli. Biar dia berkomentar sesuka hatinya. Kalau kuambil hati, tentu aku harus meluangkan waktuku yang berharga untuk mengatasinya.

Tujuanku pulang kampung kali ini adalah untuk bersantai, bermalas-malasan, menghirup segarnya udara desa yang masih asri sambil berjalan melambai. Liburan. Di kota, aku sudah terlalu sibuk, jadi ketika aku seharusnya tinggal beberapa lama di sini dalam suasana yang penuh santai, kenapa aku harus menyibukkan diri dengan hal-hal sesepel komentar orang atasku?

Aku hanya membalas dengan sepatih sapa, "Mari, Bu."

"Iya, Mas," balasnya. "Lagi jalan-jalan?"

Bahkan dengan kenyataan bahwa aku lahir dan tumbuh besar di sini pun, aku masih merasa aneh dengan orang-orang desa. Mereka suka sekali menanyakan hal-hal yang sudah jelas. Mestinya, dari penampilanku, aku tidak sedang hendak pergi ke sekolah atau bekerja, aku sedang



barneslifeloveandfamily.blogspot.com

berjalan-jalan pagi. Begitu masih ditanyai 'lagi jalan-jalan?'. Mereka suka sekali berbasa-basi. Dan karena aku tidak berminat untuk melanjutkan percakapan lebih jauh. Aku hanya tersenyum lebar sambil mengangguk sekali, lalu berbalik dan tidak menoleh lagi.

Masih ada beberapa rumah lagi yang harus kulalui sebelum aku sampai ke sawah desa, berarti masih ada beberapa tetangga yang suka berbasa-basi lagi, yang harus kuberi senyuman. Yah, walaupun tidak semuanya mengomentari. Beberapa di antara mereka sekadar menanyakan pertanyaan 'standar'

seperti "kapan datang?".

Dengan segenap kesibukanku di kota, aku memang jarang pulang kampung. Sehingga meskipun kota tempatku bekerja sekarang dan desa tempatku lahir dan tumbuh besar ini tidak terpisah oleh jarak yang jauh, aku jarang berlalu-lalang di antara keduanya. Terkadang sekali dalam empat bulan, terkadang sekali dalam enam bulan. Tahun lalu aku bahkan tidak pulang sama sekali, bahkan saat lebaran sekali pun. Jadi, sebenarnya wajar-wajar saja kalau setiap kali batang hidungku tampak di desa, orang-orang menanyakan pertanyaan basa-basi itu.

Setelah rumah-rumah habis kulewati, sekarang aku berhadapan dengan barusan bambu Ori yang rapat, berdaun lebat dengan duri-duri yang saling membelit di bagian pangkalnya. Rumpun bambu Ori yang berbaris sepanjang tiga ratus meter itulah batas antara kawasan permukiman warga dengan sawah desaku. Orang-orang di zaman kakekku yang menanamnya guna melindungi desa dari para *kampak* (perampok) yang mengintai dan kerap menyerang dari arah seberang sawah. Melihat strukturnya yang rapat lagi berduri, dengan menyisakan celah-celah kecil untuk jalan ke sawah, rerumpun bambu itu memang terasa seperti benteng. Unikny, jika benteng sungguhan dijaga oleh para prajurit, maka 'benteng' desaku itu dijaga oleh desas-desus yang menyiuatkan nyali.

Orang-orang selalu percaya bahwa rumpun bambu, di mana pun tempatnya, selalu menjadi sarang hantu. Kepercayaan itu diperkuat dengan beredarnya pengakuan-pengakuan para warga yang katanya dihantui.

"Aku pernah melihat pocong bergelantungan di pucuk bambu sebelah sana. Begini ceritanya..." salah seorang warga bercerita pada tetangganya di warung kopi.

"Kalau aku genderuwo," yang lain menimpali. "Badannya tinggi, besar, berbulu lebat dan matanya merah menyala. Waktu itu aku sedang..."

"Aku malah kuntilanak!" seorang warga lain tidak mau kalah. "Tengah malam aku dapat jadwal irigasi. Waktu aku sedang memastikan air jatahku mengalir ke sawahku, aku mendengar suara tangisan perempuan. Aku menoleh kiri dan kanan sampai mataku melihatnya. Dia membelakangiku. Kupikir perawan tersesat. Kudekati dia. Maksudku, mau kuantar pulang. Kuraba punggungnya, asli mulus. Tapi begitu dia menoleh ke arahku... Astaga! Mukanya hancur, dipenuhi darah, nanah dan belatung! Aku langsung lari tunggang-langgang."

Ketika cerita-cerita semacam ini menyebar ke luar desa lewat orang-orang di warung kopi, *kampak* atau maling mana yang mau beraksi di desaku lewat sawah? Mereka tidak berani beraksi siang hari, karena pasti akan tertangkap basah dan bisa saja dibakar warga sekampung. Sementara pada malam hari, mereka harus menanggung risiko berhadapan dengan hantu penunggu rumpun bambu.

Rumpun bambu beserta rumornya itu terbukti ampuh, setelah tumbuh subur dan cerita-cerita horor yang terjadi di sana menyebar, tingkat kejahatan yang mengancam harta-benda warga desaku jauh berkurang. Bahkan di zaman modern ini, cerita-cerita itu masih punya efek psikologis yang luar biasa kuat di kalangan warga. Meskipun cukup terpelajar untuk menemukan cacat logika dalam cerita-cerita itu, aku masih tidak bisa luput dari efeknya. Melintasi jalan yang memotong rumpun bambu itu seorang diri membuatku merinding, bulu-bulu di tengkukku semuanya berdiri setiap senti kulit tanganku mengerut seperti jeruk purut. Jantungku berdebar lebih kencang karena kemudian aku berpikiran macam-macam. Hantu jenis apa yang telah menungguku dan mengawasiku dari sela-sela bambu dan akan keluar untuk menakutiku? Aku telah terpengaruh oleh cerita-cerita yang tidak jelas kebenarannya. Namun justru karena tidak jelas itulah, efek psikologisnya lebih kuat. Cerita-cerita itu mungkin karangan saja, atau orang-orang benar-benar melihat sesuatu namun salah menafsirkannya sebagai hantu. Tapi, bagaimana kalau ternyata mereka benar?

Butuh keberanian besar untuk menembus celah yang mengarah ke sawah itu. Langkahku tiba-tiba saja terasa berat. Berkali-kali aku seolah mendengar ajakan untuk kembali. "Daripada ketemu hantu, mending ngopi di ruang tamu. Su-

dah, kembali saja," bisiknya. Di bawah naungan daun bambu yang rindang itu aku berhenti. Berdiri terpaku. Berpikir.

"Tunggu sebentar," kataku dalam hati. "Kenapa aku menjadi begitu dramatis? *Lebay!*" Seketika aku merasa diriku telah bertindak konyol. Rasa takutku kuusir paksa, dan dengan hati yang kutetapkan mantap, aku melangkah melewati rumpun bambu itu. Benar saja, aku sudah terlalu *lebay*. Hanya dalam lima langkah, aku sudah melewati rumpun bambu, dan tidak ada apa-apa. Malah di baliknya, aku menemukan sawah yang menjadi tujuan awalku tadi. Aku tersenyum sendiri ketika menyadari, betapa aku terlalu gampang terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatifku sendiri.

Matahari telah sejengkal lebih tinggi sejak kutinggalkan rumah orang tuaku tadi, namun masih tak cukup tinggi untuk mengusir bayang-bayang rumpun bambu yang membelakanginya. Dua petak pertama sawah desaku tertutup bayang bayang itu, sisanya telah dibanjiri semburat jingga yang membuat setiap embun di daun-daun padi berkilau, memendarkan cahaya keemasan.

Sekarang sedang musim hujan. Becak ada di mana-mana. Basah bahkan genangan air ada di mana-mana. Saat aku melintasi pematang, saluran irigasi yang berbaring panjang merapat ke pangkal rumpun bambu itu

telah melampaui kapasitasnya. Air keruh kecokelatan yang mengalir di atasnya tumpah ke sekitar sehingga mengubah pematang sawah yang semula tanah padat itu menjadi kubangan lumpur.

Saluran irigasi, yang di sini biasa disebut *wangan* ini, dulunya sekadar parit biasa, tanah yang digali memanjang sejajar dengan barisan rumpun bambu. Tapiannya ditumbuhi banyak rumput yang kemudian bisa diambil untuk pakan kambing. Ikan-ikan pun gemar bersarang di dasarnya yang kaya akan tanaman air. Waktu aku masih SD, aku suka sekali mencari ikan bersama teman-teman sebayaku di *wangan* ini. Ikan gabus dan lele dapat dengan mudah kuperoleh menggunakan sebuah jala kecil saja. Namun lambat laun semuanya berubah. Tahun-tahun ketika ikan-ikan gemar bersarang di sini sudah berlalu. Rumput-rumpun pun enggan tumbuh di tepiannya karena sekarang, alih-alih berupa tanah galian, ia sekarang beton. *Wangan* di tepian sawah desaku ini telah dibangun bertahap menggunakan Dana Desa yang tiba-tiba saja jumlahnya melonjak gila.

Banyak warga menginginkan saluran irigasi yang bagus. Karena dana untuk mewujudkan keinginan itu tersedia, mereka segera melakukan pembangunan yang dibutuhkan. Namun aku ragu kalau mereka telah memperhitungkan semuanya dengan cermat sebelum mulai membangun.

“TAHUN-TAHUN KETIKA IKAN- IKAN GEMAR BERSARANG DI SINI SUDAH BERLALU. RUMPUT- RUMPUT PUN ENGGAN TUMBUH DI TEPIANNYA KARENA SEKARANG, ALIH-ALIH BERUPA TANAH GALIAN, IA SEKARANG BETON.”

Struktur beton ini sendiri misalnya, berupa penggal-penggal dengan penampak lintang berbentuk trapesium terbuka ke atas, tebalnya kira-kira lima senti dan panjangnya sekitar dua meter. Beton ini seperti kepingan-kepingan lego yang besar, yang dipasangkan begitu saja ke wangan. Sayangnya, ukuran 'lego beton' itu lebih kecil dari ukuran wangan, sehingga menyisakan rongga yang cukup banyak. Penambalan dengan memanfaatkan tanah-tanah di sekitar telah dilakukan, namun tidak pernah menutup semua rongga itu. Adanya rongga-rongga menyebabkan beton kurang bantalan, dan tidak tertopang sehingga strukturnya rapuh terhadap tekanan beban berat seperti air yang membludak penuh setiap kali musim hujan tiba. Aku mencoba menjek-jejakkan kakiku di wangan beton itu. Benar saja, beberapa bagian telah goyah. Payah!

Aku bukannya bermaksud menolak pembangunan. Aku mendukung pembangunan, tapi pembangunan yang tepat sasaran dan tidak merusak lingkungan.

Meski telah menetap di kota, aku selalu senang berdiskusi tentang perkembangan desaku. Salah satu kawan sepermainanku semasa kecil di desa, sekarang menjadi aparat. Dengannyalah aku biasa bertukar pikiran tentang desaku dan segala perkembangannya.

"Apa kabar desa kita?" tanyaku pada si teman lewat WA.

Si teman langsung memahami maksudku, dia kemudian menyertikan bahwa desa kami baru saja mendapat bantuan berupa lima puluh unit lampu jalan bertenaga surya. "Nilai per unitnya lima belas juta rupiah. Survey sudah dilaksanakan, titik-titik pemasangan sudah ditetapkan, tinggal eksekusi. Diperkirakan, akhir tahun ini instalasi sudah selesai dan mulai tahun depan desa kita akan diterangi oleh lampu bertenaga matahari. Hebat kan?"

"Hebat sih, hebat. Tapi kenapa bantuan itu tidak diarahkan ke hal-hal lain yang lebih diperlukan. Listrik sudah masuk ke desa kita sejak tahun 92. Sekarang lampu-lampu neon yang terang telah berpendar di setiap ruas jalan. Bukannya kita sudah tidak kekurangan penerangan pada malam hari?"

"Hm... Masalahnya," si teman menyanggah. "Perangkat desa tidak mengajukan proposal untuk mendapatkan lampu-lampu tenaga surya itu. Kami hanya terima jadi. Bantuannya datang dari tingkat provinsi, sudah dalam bentuk lampu dan tidak bisa diuangkan atau diambil dalam bentuk lain."

"Ini mencurigakan. Apakah laporannya transparan?"

Sontak pertanyaan terakhirku itu membuat si teman ter-singgung. "Aku tidak paham. Ke mana sebenarnya arah pembicaraan kita ini?"

"Tenang, Bro," balasku santai. "Generasi kita ini seharusnya sudah jauh lebih melek tentang politik dibandingkan generasi para orang tua kita ke belakang. Kalau ada warga negara yang taat membayar pajak menanyakan transparansi anggaran belanja pemerintahnya, seharusnya aparat tidak perlu gusar. Kalau memang bersih, ya tinggal ditunjukkan saja."

Si teman membalas dengan mengirim *emoticon* tertawa, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. "Baik. Kebetulan, pekerjaanku di kantor desa tidak berkaitan dengan bantuan lampu itu. Nanti aku tanyakan ke pihak yang bersangkutan. Oh iya, omong-omong, kamu cerdas dan berwawasan luas. Orang-orang sepertimu seharusnya kembali ke kampung halaman dan membangun desanya. Bukan begitu?"

"Aku pernah berupaya melakukan itu. Beberapa tahun lalu, aku sempat mengusulkan pembentukan koperasi bahan dan alat-alat pertanian. Minimal, koperasi itu menyediakan pupuk, bibit dan obat hama. Aku bisa menjamin pasti laku. Karena selama ini orang-orang di desa kita, yang hampir semuanya petani, membeli bibit dan pupuk dari agen di desa sebelah. Mereka tidak jarang harus antri, tidak diperbolehkan membeli dalam jumlah besar dan harus rela tidak diprioritaskan.

Tentu saja, sebab para agen itu mengutamakan warga desa mereka sendiri. Karena itulah, koperasi di desa kita pasti akan tumbuh dengan cepat. Aku bahkan sempat bermimpi, kalau koperasi itu sudah besar, ia juga menyediakan mesin-mesin pertanian seperti pompa diesel dan traktor."

Aku berhenti sebentar karena jari-jariku pegal memenceti *keypad*. Lalu aku melanjutkan lagi, "Waktu aku mengajukan usulan itu, dana untuk membentuk koperasi kecil tersedia, tinggal eksekusi juga. Tapi aparat desa lebih memilih membangun saluran irigasi. Aku mengusulkan penyiptaan arus uang yang berputar di desa kita, tapi kalian lebih menyukai prasarana-prasarana yang tidak menghasilkan uang kembali. Kalian lebih menyukai barang-barang mati. Jadi, daripada membangun desa, lebih baik aku mencari kesibukan sendiri di kota yang jauh lebih menjanjikan ini."

Generasi kita ini seharusnya sudah jauh lebih melek dibandingkan generasi para orang tua kita ke belakang. Kalau ada warga negara menanyakan transparansi anggaran belanja pemerintahnya, seharusnya aparat tidak perlu gusar. Kalau memang bersih, ya tinggal ditunjukkan saja.

\*HARI TAQWAN SANTOSO, tinggal di Yogyakarta. Aktif sebagai volunteer Global Village untuk Habitat for Humanity Yogyakarta. Pernah menerbitkan novel *The Jazab Boy* (Diva Press, 2012), *Mandaraka* (RWTC, 2017) *Antologi Puisi Teruntuk Mentari dan Rembulan* (Bebook Publisher, 2016), *Sajak-Sajak Rembulan Biru* (WA Publisher, 2017). Penulis dapat dihubungi lewat wa : 08987766859 atau email : narasoma7@gmail.com.



## Mengawal Stabilitas Pemerintahan di Daerah

**T**ERMINOLOGI pemerintahan di daerah sangat populer pada era orde Baru. Payung hukumnya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Ciri pokok adanya pemerintahan di daerah, tampak dari keberadaan dua entitas pemerintahan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota, yakni pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah. Pemerintahan daerah, sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, memiliki perangkat daerah yang berperan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan pemerintahan wilayah, sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi, memiliki instansi vertikal di daerah yang berperan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam konfigurasi pemerintahan di daerah berinstitusi ganda, UU Nomor 5 Tahun 1974 mengatur peran ganda (*dual role*) gubernur, bupati, dan wali kota. Peran pertama sebagai Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran kedua sebagai Kepala Wilayah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan wilayah. Tugas utama kepala wilayah adalah mengawal stabilitas pemerintahan di daerah, melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (*algemene bestuur*), termasuk koordinasi pelaksanaan tugas instansi vertikal dengan tugas perangkat daerah.

Dalam mengawal stabilitas pemerintahan di daerah, Kepala Wilayah membutuhkan peran tiga instansi vertikal strategis di daerah, yakni unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Untuk itu, dibentuk wadah Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Muspida dipimpin Kepala Wilayah, dengan anggota dari unsur pimpinan DPRD, dan pimpinan tiga instansi vertikal tersebut. Dalam perannya sebagai pimpinan Muspida, para gubernur, bupati, dan wali kota



sering disebut sebagai “*primus inter pares*” (orang pertama di antara yang setara).

Terminologi pemerintahan di daerah seakan redup sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini tidak lagi mengatur peran ganda gubernur dan bupati/wali kota, seperti diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974. Yang diatur hanya peran ganda Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat, namun bupati/wali kota hanya memiliki peran tunggal sebagai kepala daerah. Ketentuan ini masih berlaku hingga saat ini. UU Nomor 32

Tahun 2004 (pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 (pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004) tidak merubah ketentuan tersebut.

Namun, UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur secara tegas tentang peran Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) sebagai pengganti Muspida. Susunan anggota Forkopimda sama dengan anggota Muspida. Yang berbeda, Forkopimda dipimpin Kepala Daerah, sedangkan Muspida dipimpin Kepala Wilayah. Tugas utama Forkopimda adalah mengawal stabilitas pemerintahan di daerah, melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Rincian urusan pemerintahan umum (seperti pengamalan Pancasila; pembinaan wawasan kebangsaan; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; mewujudkan stabilitas keamanan; penanganan konflik sosial; pengembangan kehidupan demokrasi; dan koordinasi pelaksanaan tugas instansi vertikal dengan tugas perangkat daerah), merupakan urusan pemerintahan yang sangat strategis dalam mengawal stabilitas pemerintahan di daerah.

Urusan Pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, harus dilak-

sanakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah kerja masing-masing. Oleh karena itu, efektivitas koordinasi oleh setiap gubernur, bupati, dan wali kota terhadap seluruh anggota Forkopimda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, merupakan faktor penting dalam mengawal stabilitas pemerintahan di daerah.

### Relasi harmonis

Setiap kepala daerah harus mampu mengemban tugasnya secara efektif. Untuk itu, ada dua prasyarat kemampuan kepala daerah, yakni kemampuan politik dan kemampuan administratif (Pamudji, 1992: 62). Hal ini juga diuraikan Mouritzen & Svava dalam buku ‘*Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments*’ (2002: 8) bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses politik dan proses administrasi, sehingga pemimpin puncak (kepala daerah) harus mampu berperan sebagai politisi (kemampuan politik) dan sebagai administrator (kemampuan administratif).

Sejak pemilihan kepala daerah oleh rakyat (pilkada) mulai bulan Juni 2005, kebanyakan kepala daerah terpilih masih rendah kemampuan politik dan kemampuan administratif. Implikasinya, para kepala daerah tersebut memperoleh tingkat loyalitas yang cukup rendah dari pimpinan instansi vertikal. Keengganan anggota Forkopimda menghadiri rapat yang diundang kepala daerah, merupakan contoh kecil dari rendahnya loyalitas itu. Loyalitas yang rendah, sebagai ekspresi relasi tidak harmonis antara kepala daerah dan anggota Forkopimda (misalnya ketegangan relasi antara kapolda atau pangdam dengan gubernur), dapat mengancam stabilitas pemerintahan di daerah.

Realita terkini menunjukkan telah terjadi relasi tidak harmonis antara kepala daerah dan anggota Forkopimda. Pemanggilan gubernur oleh kepolisian daerah untuk melakukan penyelidikan atas suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana, merupakan contoh kecil dari realita itu. Dalam perspektif etika pemerintahan, tampak kurang etis bila anggota Forkopimda melakukan perseteruan dengan kepala daerah sebagai ketua Forkopimda. Untuk meredakan perseteruan tersebut, Kepala Daerah sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam menegakkan stabilitas pemerintahan di daerah, patut memulai inisiatif untuk membangun kembali relasi harmonis

dengan anggota Forkopimda tersebut. Bila hal ini gagal, upaya terakhir yang patut dilakukan kepala daerah adalah mengusulkan perpindahan anggota Forkopimda tersebut kepada atasannya, meskipun hal ini tidak diatur dalam perundang-undangan. Seluruh upaya tersebut harus murni dilandasi kemauan politik (*political will*) untuk memperkuat peran bersama dalam mengawal stabilitas pemerintahan di daerah.

Kestabilan pemerintahan di daerah akan mendukung peningkatan kinerja seluruh lembaga pemerintahan dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, para gubernur harus membangun relasi harmonis dengan pimpinan DPRD, pangdam, kapolda, dan kajati, dan para bupati/wali kota harus membangun relasi harmonis dengan pimpinan DPRD, dandim, kapolres, dan kajari.

### Kembalikan peran ganda

Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, telah terjadi kekeliruan regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya pada level kabupaten/kota, karena bupati/wali kota hanya diberi peran tunggal sebagai kepala daerah (entitas pemerintahan daerah). Pada hal, masih ada instansi vertikal di wilayah kabupaten/kota (entitas pemerintahan wilayah).

Secara akademik, kepala daerah hanya memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah tidak memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan wilayah, khususnya memimpin Forkopimda, karena wewenang tersebut melekat pada peran kepala wilayah atau wakil pemerintah pusat.

Kekeliruan regulasi ini harus diatasi untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya pengawalan stabilitas pemerintahan di daerah kabupaten/kota, bila ada anggota Forkopimda yang enggan dikoordinasikan oleh bupati/wali kota. Hal ini bisa terjadi, bila ada anggota Forkopimda memahami bahwa kepala daerah tidak berwenang mengkoordinasikan instansi vertikal di daerah. Untuk itu, dalam merevisi UU Nomor 23 Tahun 2014, perlu diatur kembali ketentuan tentang peran ganda bupati/walikota sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat.

Anselmus Tan

Dosen Fakultas Manajemen Pemerintahan  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri



## Berbagai Inovasi dan Teladan dari Bali

**B**ERDASARKAN laporan di pemeringkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) di tahun 2018, posisi sepuluh besar didominasi oleh kota-kota di Provinsi Bali yaitu Gianyar sebagai juara, Tabanan di posisi ke-4 disusul Kota Denpasar di peringkat 5 dan Badung di ranking ke-6. Dilihat dari kategori provinsi, Provinsi Bali juga tercatat sebagai daerah dengan skor tertinggi 0,6889 dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Dengan demikian, Provinsi Bali boleh dikata menjadi daerah tersehat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, masyarakat yang tinggal dan hidup di Provinsi Bali, berpeluang memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan daerah lainnya. Hebatnya lagi, pencapaian Provinsi Bali sudah diraih sejak 2013 dan terus dipertahankan hingga kini. Beberapa improvisasi yang dihasilkan diantaranya indikator kesehatan lingkungan dengan nilai 0,9258 serta penurunan Indeks Penyakit Tidak Menular (IPTM) menjadi 0,5444 di 2018. Hal lainnya juga terjadi pada level kesehatan balita dan reproduksi.

Dalam metodologinya, IPKM fokus kepada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sektor-sektor kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Indikator kesehatan lingkungan misalnya terdiri dari sub indikator akses terhadap sanitasi dan air bersih. Sementara indikator PTM memiliki sub indikator penanganan dan sebaran penyakit hipertensi, diabetes, obesitas sentral, cedera, kesehatan gigi dan mulut serta gangguan mental emosional. Indikator vital lainnya adalah kesehatan balita dan reproduksi yang mengandung sub indikator infrastruktur kesehatan yang lebih baik dan mudah dijangkau selain program yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Jika dibagi secara detail, IPKM memiliki sebaran sub indikator yang



multidimensional hingga mencapai 30 sub indikator.

Status IPKM Provinsi Bali ini juga diamini pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hingga tahun 2018, Provinsi Bali menjadi daerah dengan IPM tinggi di Indonesia bersama dengan 13 daerah lainnya diantaranya. AHH untuk perempuan di Provinsi Bali meningkat tipis dari 73.35 tahun 2017 menjadi 73.53 di tahun 2018. Sementara untuk jenis kelamin pria, AHH Provinsi Bali tahun 2017 sebesar 69.58 kemudian naik menjadi 69.80 di 2018. Meski masih menghadapi sedikit kendala, penulis melihat

bahwa daerah-daerah di Provinsi Bali sepertinya mampu menjadi contoh praktek pengelolaan kota terbaik di Indonesia. Bukan hanya layak menjadi tujuan investasi melainkan juga tetap menjaga harmoni kehidupan bersama dengan alam.

Konteks investasi yang harmoni dengan alam inilah sejatinya perlu dijadikan jargon masa depan untuk pola pengembangan kota-kota besar di Indonesia ke depannya. Jangan sampai hanya demi mengejar pertumbuhan ekonomi semata, kota menghancurkan sendi-sendi sosial dan lingkungan. Ingat bahwa sosial dan lingkungan juga memiliki keterbatasan dalam bentuk daya dukung dan daya tampung. Sehebat apapun pertumbuhan ekonomi daerah akan dicapai, ketika daya dukung dan daya tampung terlewat, hanya tinggal menunggu waktu saja akan terjadinya bencana.

### Bali energi bersih

Sisi teladan lainnya, Gubernur Bali sudah mengeluarkan Pergub Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Di dalam aspek pertimbangan utama, disebutkan adanya keinginan untuk menciptakan Pulau Bali yang

bersih, hijau dan indah sekaligus menjaga kesucian harmoni alam yang mengacu kepada visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Dijelaskan pula bahwa energi Bali yang ramah lingkungan harus dikelola dengan baik supaya dapat mendatangkan kemanfaatan ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan bagi masyarakat di Bali.

Definisi energi bersih dalam beleid ini dimaknai sebagai energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang dalam produksi maupun penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam jumlah yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup yaitu gas alam dan energi terbarukan. Beberapa sumber energi terbarukan yang dirujuk diantaranya sinar matahari, tenaga air, angin, panas bumi, biomassa, biogas, sampah di kota/desa, gerakan atau perbedaan suhu lapisan laut serta bahan bakar nabati cair. Sumber energi bersih tersebut akan dikelola oleh beberapa institusi seperti pemda, BUMN/BUMD, pelaku usaha, UMKM, koperasi dan atau desa adat. Rentang pengelolaan energi bersih di Bali meliputi penyediaan dan pemanfaatan, pengusahaan serta konservasi. Di dalam klausul penyediaan dan pemanfaatan energi bersih, dimungkinkan untuk segala jenis usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik dan non-listrik.

Untuk sumber energi sinar matahari, penyediaan dan pemanfaatannya dikelola dalam skema Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar, PLTS skala kecil/komunal/desa adat, PLTSA skala kecil untuk kebutuhan pribadi, pemasangan panel surya untuk seluruh bangunan pemerintah/komersial/industri/sosial dan rumah tangga disamping pemenuhan kebutuhan non-listrik. Hal yang sama juga diamanatkan untuk sumber energi yang lainnya dalam kapasitas skala besar, menengah, kecil dan individu. Pola ini ke depannya diharapkan mampu menjadi dorongan signifikan bagi upaya perubahan pola perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di Bali untuk bergerak ke arah pengembangan energi bersih.

Tak ketinggalan, regulasi juga mengamankan adanya pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam pengusahaan dan pemanfaatan energi bersih. Untuk *start up* awal membuka usaha, diupayakan adanya tenaga kerja lokal minimal 25 % dari total tenaga kerja yang dipakai. Ketika memasuki usia usaha tahun kelima, maka ketentuan minimal naik menjadi 50% dan 75% ketika memasuki periode usaha

tahun ke-10. Pelaku usaha energi bersih juga wajib menggendeng institusi pendidikan lokal demi terciptanya kemajuan bersama dan transfer pengetahuan.

Sebagai bentuk keberpihakan dalam aspek pendanaan, pemda mengalokasikan belanja dalam skema Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah sesuai regulasi. Kemandirian sumber pendanaan dari peran serta APBN jelas mengindikasikan adanya inovasi yang luar biasa dari Provinsi Bali sekaligus menjadi contoh praktik baik yang wajib diadopsi di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kemandirian ini sekaligus menjadi bukti valid kesuksesan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sebelumnya selalu dimaknai meningkatnya ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan (Daper).

Tak salah jika teladan hijau ini harus disiarkan dengan seksama dan gegap gempita plus diberikan *reward* yang memadai dari pemerintah pusat melalui alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Terlebih dalam waktu yang bersamaan telah diterbitkan pula Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai. Pergub KBL Berbasis Baterai diharapkan mampu menjembatani peralihan moda transportasi di Bali yang awalnya berbasis *fossil fuel* menuju kendaraan berenergi bersih. Dan isu ini makin penting di masa pandemi ini ketika Provinsi Bali menjadi salah satu daerah terdampak paling parah akibat penurunan drastis kunjungan wisatawan. Dengan memberikan insentif atas berbagai inovasi dan teladan yang sudah dijalankan, setidaknya memberi penghargaan atas komitmen yang belum dijalankan oleh semua daerah di Indonesia.

Inovasi tampaknya akan menjadi kata mantra yang sakti ke depannya. Terlebih di era kenormalan baru seperti saat ini, inovasi yang di dorong di banyak daerah akan menjadi kunci keberhasilan daerah-daerah tersebut. Ingat bahwasanya inovasi tidak mengenal status daerah kaya atau miskin. Tidak pula mengenal penggolongan berdasarkan kriteria apapun. Inovasi dapat dijalankan oleh semua daerah baik kaya atau miskin. Inovasi juga yang menjadi pembeda antara pemenang dengan pihak yang kalah dalam mengarungi kompetisi di era kenormalan baru. Semoga!

Joko Tri Haryanto  
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan



## Berlibur

**M**A L A M minggu terakhir di tahun ini, saya habiskan waktu duduk sendiri di balkon depan indekos. Sambil selonjor santai, menikmati seduhan kopi robusta tanpa gula. Sese kali dersik angin datang mengusir gerah. Bersahutan dengan dercic kipas angin tua yang



untuk menggeleng sempurna pun ia sudah tidak mampu. Ditemani bulan berwujud tegas dengan karibnya si bintang yang genit berkedip di bumantara. Entah mengapa awan kala itu malu hadir di langit Desember yang biasanya basah. Lirih saya juga mendengar obrolan bapak-bapak kompleks yang gemar berkumpul di surau selepas isya. Dari singgasana balkon ini, saya bisa memandang dua lanskap berbeda: gedung-gedung tinggi dengan gebyar lampu dan sesaknya pemukiman khas sudut Kota Jakarta. Selalu indah seperti biasanya. Saat itu rekan sejawat saya yang lain, semua sedang pulang ke kampung halaman. Sehingga hanya saya yang mendiami lantai atas indekos. Karena sendiri, saya hanya mampu duduk termangu. “Mampus kau dikoyak sepi”, mungkin begitu ejek Chairil Anwar.

Namun sepi selalu mampu menghadirkan nuansa spiritual yang berbeda. Mungkin saat itu, malam sengaja merelakan hiruk pikuknya untuk saya agar dapat khuyuk berkontemplasi. Senyatanya tahun ini juga kita lalui dengan penuh elegi. Kisah-kisah nelangsa hadir silih berganti akibat ulah pagebluk. Berpulangannya sanak-saudara, morat-maritnya ekonomi, hilangnya pekerjaan, hingga kita dipaksa menjalani momen hari raya keagamaan dengan suasana yang berbeda. Tergopoh-gopoh bertahan menjalani bulan demi bulan, berperang melawan pandemi. Rasanya memang

lungkrah dipaksa takluk oleh jarak. Sehingga tidak ada salahnya, saya mengunjungi karib terdekat, yaitu diri sendiri. Tepat di pamungkasnya tahun sialan ini. Sembari mata memandang ke ufuk jauh, saya mencoba berlibur ke sanubari. Saya menyapanya dan merayu dirinya untuk duduk menemani malam ini. Saya hanya

ingin kembali menemukan versi otentik dari diri sendiri.

“Apa mau kamu?”, tanya saya kepada hati. Saya hanya merasa kesal dengan beragam ulahnya tahun ini. Contoh saja, dimentahkannya semua karsa saya untuk menemukan karib untuknya. “Kamu itu terlalu bawel, minta begini minta begitu. Lain kali sudahlah terima saja calon yang saya ajukan untukmu!”, sedikit sene wen saya menasihatinnya. Dia hanya melengos. Mungkin dia sedang tidak ingin menemuiku. Saya memang sadar, banyak perbuatan lalim setahun ini. Seperti ingkar untuk lebih berbakti kepada orang tua. Ingkar untuk lebih banyak berderma. Ingkar untuk tidak mudah mengumpat keadaan. Ingkar untuk menghargai waktu. Ingkar untuk lebih peduli dengan alam sekitar. Ingkar untuk tidak mengutil hak orang lain, dan beragam dosa lainnya. Saya kembali nawaitu dan berjanji kepada hati untuk mewujudkannya tahun depan.

Setelah semua pengakuan itu, sang hati tetap enggan menemuiku. Entah karena marah atau malu karena jarang dia dikunjungi. Tidak mengapa, asalkan dia masih mengenali sosok diri saya, itu lebih dari cukup. Hati lambat-lambat menjauh, seakan berpamitan dan menyatu dalam malam yang semakin gelap. Saya pun terlelap di balkon itu, mengakhiri liburan saya mengunjungi dinginya hati.

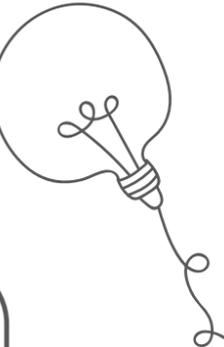
■ AJI NUR CAHYO

# JUMLAH TOTAL INOVASI

Terhimpun dalam sistem Indeks Inovasi Daerah s.d 14 Desember 2020

## 17.779 INOVASI

\*angka ini terus bergerak



## INOVASI DAERAH

## 484 DAERAH



## JUMLAH PEMERINTAH DAERAH

Yang mengisi indeks inovasi daerah

Inovasi yang dilombakan pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2020 adalah inovasi yang diterima sistem indeks inovasi daerah sampai 20 September 2020.



# JBP JURNAL BINA PRAJA

Journal of Home Affairs Governance

Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance is an online publishing in the Home Affairs Governance. Jurnal Bina Praja, an internationally peer-reviewed open access journal, publishes significant, cutting-edge and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.

## CALL FOR PAPER

### AIM AND SCOPE

Its central aim is thereby to enhance the broad scholarly understanding of the range of contemporary political and governing processes, and impact upon of states, political entities, international organizations, communities, societies and individuals, at international, regional, national, local, and village levels.

Submissions that focus upon the political or governance-based dynamics of any of these levels or units of analysis in way that interestingly and effectively brings together conceptual analysis and empirical findings are welcome.

### HOMEPAGE

[jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index](http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index)

### INDEXED BY



### TERMS & CONDITIONS

- Open to the public.
- Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research.
- Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team.
- Submitted manuscripts have not been published in other media.
- Manuscripts have strong idea, novelty, originality, and global issues.
- Manuscripts should have a minimum of 35000-38000 character in Indonesian or English (preferably in English).
- A minimum of 25 references should be cited from high-impact journals indexed in Scopus and/or Web of Science.
- Attach biodata along with complete mailing address and contact number.
- For the writing systematics and format, see <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index>

### PERIOD OF PUBLICATION

**APRIL, AUGUST  
DECEMBER**

Deadline for receipt of manuscripts for April:  
**January, 30<sup>th</sup> 2021**

For more details : +62812-1941-9885  
[editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id](mailto:editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id)